

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA  
PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**ANGGA ARDIANSYAH PUTRA**

**NPM : 167110395**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai”** penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos.,M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
5. Ibu Rosmita, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan penulis.
7. Terkhusus dan Istimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua, adek dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama penulis melaksanakan studi.
8. Bapak/Ibu General Manager PT Pertamina RU II Dumai dan khususnya Unit Manager Communication, Relations & CSR RU II Dumai yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait penelitian saya.
9. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terutama semua yang ada didalam Grup “Diam-Diam” yang telah memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dinilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 22 November 2021

  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
• Tujuan Penelitian.....	12
• Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	14
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik.....	20
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik .....	24
4. Konsep Tanggung Jawab sosial Perusahaan (CSR).....	31
5. Konsep Kebijakan Publik.....	45
6. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	53
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	60
C. Kerangka Pikir .....	63
D. Konsep Operasional .....	64
E. Operasional Variabel.....	67
F. Teknik Pengukuran .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>76</b>
A. Tipe Penelitian .....	76
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Populasi dan Sampel .....	77

D. Teknik Penarikan Sampel.....	78
E. Jenis dan Sumber Data .....	78
F. Teknik Pengumpulan Data .....	79
G. Teknis Analisis Data .....	80
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	82
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	83
B. Visi dan Misi Perusahaan .....	86
C. Struktur Organisasi.....	88
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>89</b>
A. Penyajian Data Hasil Penelitian .....	89
1. Identitas Key Informan dan Informan .....	90
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	91
1. Komunikasi .....	92
2. Sumber Daya.....	98
3. Disposisi.....	105
4. Stuktur Birokrasi .....	113
C. Matriks Telly Kesimpulan Penelitian .....	119
D. Faktor – Faktor Penghambat .....	124
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA .....</b>	<b>134</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman :</b>
Tabel 1.1	Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina RU II Dumai..... 4
Tabel 1.2	Dampak Positif Program PT Pertamina RU II Dumai ..... 5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu ..... 60
Tabel 2.2	Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai ..... 67
Tabel 2.3	Program Pelatihan PT Pertamina RU II Dumai ..... 74
Tabel 3.1	Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai..... 77
Tabel 3.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai. .... 82
Tabel 5.1	Identitas Key Informan dan Informan.....90
Tabel 5.2	Matriks Telly Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai ..... 119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility ( CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.....	63
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Refinery Unit II Kota Dumai .....	88

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Ardiansyah Putra  
NPM : 167110395  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021

Pelaku Pernyataan



**Angga Ardiansyah Putra**

**ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA  
PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II KOTA DUMAI**

**ABSTRAK**

**Angga Ardiansyah Putra**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai. Adapun indikator yang digunakan adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Adapun yang menjadi populasi dan sampel yaitu Unit Manager Comm, Rel, & CSR RU II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rel, & CSR RU II Kota Dumai, Masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu Kurangnya komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan perusahaan dalam hal mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat, hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses kelancaran program-program yang direncanakan oleh perusahaan. Kurangnya respon dari masyarakat terhadap program CSR yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan program yang dibuat oleh perusahaan menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan efektif. Forum tanggung jawab sosial perusahaan tidak mengawasi keberlangsungan program yang dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan belum mengetahui bahwasannya forum tanggung jawab sosial perusahaan sudah ada di Kota Dumai, begitu juga dengan forum tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak menunjukkan diri kepada PT Pertamina RU II Kota Dumai bahwasannya forum tanggung jawab sosial perusahaan ini telah terbentuk.

**Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan, CSR, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR) AT PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY  
UNIT II DUMAI CITY**

**ABSTRACT**

**Angga Ardiansyah Putra**

*This study aims to identify, analyze and explain the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai City. The indicators used are Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This type of research is a qualitative research method, a research method based on the philosophy of positivism. As for the population and samples, namely Unit Manager Comm, Rel, & CSR RU II Dumai City, Coordinator Staff of Comm, Rel, & CSR RU II Dumai City, Community. In this case the researcher collects data through interviews, observations, and documentation. The inhibiting factor is the lack of communication and coordination between the government and the company in terms of synergizing the programs that will be implemented for community empowerment, this results in obstacles in the smooth process of the programs planned by the company. The lack of response from the community to the CSR programs provided by the company has resulted in the programs created by the company being hampered and not being implemented effectively. The corporate social responsibility forum does not oversee the sustainability of programs implemented by the company. The company does not yet know that a corporate social responsibility forum already exists in Dumai City, as well as a corporate social responsibility forum that does not show itself to PT Pertamina RU II Dumai City that this corporate social responsibility forum has been formed.*

**Keywords: Analysis, Implementation, CSR, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai City**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berbentuk Republik menurut UUD 1945 dimana memberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing yakni berupa tugas pembantuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan dari masyarakat yang disebut dengan otonomi daerah berupa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah salah satunya pemerintahan wajib berkaitan tentang pemenuhan pelayanan Dasar yakni berupa:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Bahkan salah satu bentuk pencapaian tujuan Undang-undang tersebut dengan adanya bentuk pemberdayaan masyarakat berupa Peraturan-peraturan Daerah yakni tanggung jawab sosial perusahaan yakni peraturan daerah provinsi riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan diprovinsi riau yakni disebutkan tujuan khusus dari Program Tanggung jawab sosial

perusahaan meliputi:

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
2. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara Terpadu dan berdaya guna;
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak –pihak yang tidak berwenang;
5. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
6. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan pada bab 5 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada pasal 74 yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah Daerah berharap pembangunan dapat dilaksanakan dengan atau pun melalui salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaan atau badan usaha maupun industri, dengan mengeluarkan atau menerbitkan salah satu penunjang terlaksananya pembangunan melalui stakeholder yakni pihak swasta ataupun perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, berupa Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebutkan dalam BAB I pasal I pada point 10 disebutkan bahwa:

“Tanggung jawab sosial perusahaan, selanjutnya disingkat (TJSP) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Dengan adanya peran pembangunan ekonomi berkelanjutan diharapkan juga Pemerintah Daerah kota Dumai juga mengharapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diarahkan kepada ruang lingkup program utama yang

tercantum dalam peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 ayat

1 berupa:

- a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- d. Kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- e. Tanggap darurat sosial dan bencana alam; dan
- f. Pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.

Adapun program-program utama Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Dumai tercantum dalam 4 pilar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Program-program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina RU II Dumai Yang Berfokus Kepada Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang	Program	Keterangan
Pertamina Berdikari yaitu Program CSR yang bertujuan untuk mengkreasikan masyarakat mandiri dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan modal untuk masyarakat dalam kegiatan pembudidayaan ikan lele</li> <li>2. Mitra Binaan Pertamina Refiinery Unit II Dumai lainnya yaitu KSM ADELI'S yang terbentuk pada tanggal 25 Januari 2013. KSM ADELI'S adalah usaha yang menampilkan beragam produk yang merupakan hasil karya tangan, seperti gantungan kunci, bros baju, alas dan tutup gelas, kotak tisu, kerudung, serta baju yang dibordir</li> </ol>	Terlaksana

	dengan sangat indah 3. Kampung Minapolitan 4. Penguatan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif	
--	--	--

Sumber: Laporan PT Pertamina RU II Dumai tahun 2018-2019

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tahun 2018/2019 PT Pertamina RU II Kota Dumai menjelaskan bahwa anggaran dalam program kegiatan Pertamina Berdikari yang bersumber dari dana CSR PT Pertamina RU II Kota Dumai yaitu sejumlah Rp 75.000.000 dan sudah direalisasikan.

Keberadaan adanya program-program tersebut diharapkan perusahaan mampu memberikan dampak positif namun tak juga yang dirasakannya dampak negatif begitu pun harapan dari setiap daerah-daerah yang memiliki atupun terkena dampak oleh perusahaan yang beroperasi di lingkungan nya karena sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakannya.

Berikut dampak positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Dampak Positif Program PT Pertamina RU II Dumai**

No	Sebelum	Sesudah
1.	Tahun 2018, para petani masih menggunakan sistem bercocok tanam (menggunakan cangkul)	Sistem penanaman berubah 50% menjadi tanaman hidroponik di dalam <i>green house</i> , guna menunjang produktivitas petani lansia
2.	Tahun 2018, petani hanya memiliki <i>skill</i> budidaya lele (pemeliharaan dan pemijahan)	Tahun 2019 melakukan pengolahan lele menjadi es dawet

Sumber: Laporan PT Pertamina RU II Dumai 2018/2019

Hal ini pun yang dirasakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau yakni Kota Dumai , kota Dengan majunya Perindustrian Dumai memiliki visi dan misi yakni disebutkan mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021, yakni berupa :

1. Masyarakat Dumai yang makmur : keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin
2. Masyarakat Dumai yang Madani : keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi ber peradapan.
3. Tahun 2021 : merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan diatas adalah :

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan

6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Dalam mewujudkan visi dan misi kota Dumai tersebut pemerintah daerah kota Dumai mewujudkan salah satu visi ataupun misi maka pemerintah daerah kota Dumai yang juga dikenal sebagai kota minyak. Tiga industri yang turut serta dalam kemajuan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI ( dahulu Caltex Pasific Indonesia sekarang Chevron Pasific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, termasuk PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri, PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company ), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Pertamina pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (PERSERO) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November tentang minyak dan gas bumi. Pertamina (dahulu bernama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara), adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

PT. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company ), yang berdiri sejak tanggal 10

Desember 1957 dengan nama PT. Pertamina pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (PERSERO) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November tentang minyak dan gas bumi. Pertamina (dahulu bernama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara), adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Sejarah berdirinya PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, pembangunan kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai dilaksanakan tanggal 20 April 1969 atas dasar persetujuan “ Turn Key Project” merupakan hasil kerjasama Pertamina dengan Far East Sumitomo Sloye Kaisha yang merupakan kontraktor Jepang, kilang ini dikukuhkan dalam surat keputusan direktur utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 334/ Kps/DM/1967. Alamat dari PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai ini di Jl. Raya Kilang Putri Tujuh, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau.

Pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) dalam lingkup organisasi, diantaranya adalah (Sulistyaningtyas, 2006):

1. Adanya arus globalisasi, yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas diantara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai mata rantai globalisasi;

2. Konsumen dan investor sebagai public primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya;
3. Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan (good corporate governance));
4. Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standard etika berorganisasi, ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial;
5. Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi;
6. Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.

Sedangkan menurut Heimann (2008) menyebutkan beberapa alasan mengapa CSR penting karena:

1. Merupakan hal etis yang dilakukan;
2. Meningkatkan citra perusahaan;
3. Menghindari peraturan yang berlebihan;
4. Jenis kegiatan tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan;
5. Lingkungan sosial yang lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan;
6. Dapat menarik minat investor;
7. Dapat meningkatkan motivasi karyawan;
8. Memperbaiki masalah sosial;

Ketika masyarakat mengajukan proposal terkait program CSR yang ingin dilaksanakan, perusahaan terlebih dahulu menselektif program dari masyarakat tersebut. Apabila program yang diajukan sesuai dan diterima oleh perusahaan kemudian dana CSR itu cair, maka masyarakat yang berhak secara SOP memiliki tanggung jawab penuh atas bantuan CSR tersebut. Setelah itu, masyarakat diberi pelatihan oleh perusahaan agar masyarakat melaksanakan program tersebut secara mandiri, sehingga pihak perusahaan mendapat timbal balik dari hasil program yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Kemudian setelah diberi pelatihan oleh perusahaan terus program tersebut dijalankan oleh masyarakat, pihak perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai rangkaian dalam sistem keberlanjutan program yang dapat memberikan penilaian kelayakan terhadap suatu program secara sistematis dan terukur. Dengan adanya monitoring yang berperan sebagai fungsi pengawasan dalam manajemen yang dapat menyediakan indikator pencapaian suatu program dan dibandingkan dengan target pencapaian yang telah ditetapkan sebelum menjadikan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan penilaian yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari hasil pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi merupakan proses tahap akhir yang lebih sistemik dalam menilai dampak yang dihasilkan dari sebuah pelaksanaan program.

Terdapat enam tahap dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, antara lain indentifikasi tujuan program, analisis permasalahan yang muncul, deskripsi dan standarisasi program, ukuran tingkat pelaksanaan, penentuan perubahan

akibat dampak program dan indikator suatu dampak program. Secara sederhana bila dibagi antara monitoring dan evaluasi dimana monitoring merupakan proses penilaian pada aspek *input*, *output* dan *outcome* suatu program, maka evaluasi merupakan penilaian pada aspek dampak dari suatu program. Aspek *input* seperti proses sosialisasi program tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan *output* merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan program dan *outcome* merupakan penilaian terhadap hubungan timbal balik antara keberhasilan kelompok mengelola program dengan masyarakat sekitarnya. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian terkait *impact* suatu program. Penilaian tersebut melihat pada bagaimana sikap masyarakat dapat memberikan sikap positif atau negatif terhadap suatu program.

Dalam pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan PT. Pertamina yang memang seharusnya melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan karena telah bergerak di bidang sumber daya alam. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab sosial perusahaan dan hambatan-hambatan yang dirasakan PT.Pertamina dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dan juga ditemukannya beberapa fenomena empiris yakni sebagai berikut:

- a. Forum CSR yang ada di kota Dumai kurang aktif dalam menjalankan CSR
- b. Kurangnya informasi yang luas kepada masyarakat tentang bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga sebagian

masyarakat sekitar perusahaan belum mengetahui sepenuhnya bahwa bantuan itu ada.

- c. Forum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) tidak mengawasi keberlangsungan program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang “ **Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kendala apa saja dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.

- Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis, yaitu sangat diharapkan dapat berguna untuk sumber informasi dan penelitian lanjutan, penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.

2. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik.

3. Kegunaan Praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai, agar dapat mengembangkan badan usaha milik negara yang dikelola dan lebih mensosialisasikan badan usaha yang ada.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka kiranya perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data, diantaranya :

#### 1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

##### a. Konsep Administrasi

Siagian berpendapat bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Syafri,2012:9).

Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai "darah" bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. (dalam Siagian,2001:267)

Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau

lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula.( dalam Siagian,2001:267).

Bahkan lebih lanjut dikatakan Herbert A. Simon menyebutkan bahwa administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang ( dalam Syafri,2014:9)

Dwight Waldo menyebutkan administrasi sebagai :

“tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki bahkan lebih lanjut dijelaskan orang mampu dan dapat memaksimalkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menghubungkan dengan cermat antara sarana atau usaha dan tujuan atau hasil” (dalam Syafri 2014:10).

Dwight waldo (dalam syafri 2014:10) pun berpendapat terdapat 4 ide pokok yang dapat disimpulkan dari arti administrasi:

1. Administrasi adalah kegiatan.
2. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sekelompok orang.
3. Rangkaian kerja sama itu dilakukan secara efisien.
4. Rangkaian kegiatan kerja sama yang efisien itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

#### **b. Konsep Administrasi Publik**

Menurut Pfifner dan Presthus (dalam Wirman 2014:20) menyebutkan Administrasi publik sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah:

“Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan” (dalam Wirman, 2012:22).

Bapak Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah:

“Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta” (dalam Wirman, 2012:21).

R.C. Chandler dan J.C. Plano (dalam Indradi 2016:105) menyatakan bahwa administrasi publik adalah:

“Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

### c. Prinsip- Prinsip Administrasi

Prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.

6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (*top manager*). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
9. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.

12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

#### **d. Unsur- Unsur Administrasi**

Konsep administrasi memiliki sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terikat dan bersinergi. instrumen tersebut dalam bentuk unsur yang mutlak harus ada. Artinya jika tidak adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai dengan apa yang telah dikehendaki bersama. Menurut Wirman (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen

3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Berdasarkan pengertian Administrasi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi ialah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Administrasi Publik merupakan Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

## **2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik**

### **a. Konsep Organisasi**

Pengertian organisasi secara statis adalah wadah untuk berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama (Dalam Nawawi 2005:8).

Menurut Siagian (2003:6) juga mendefenisikan dan memaknai organisasi sebagai berikut :

“Sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang disebut

atasan dan seorang/kelompok orang disebut bawahan’.

Menurut Gareth R.Jones (dalam Maksudi 2017:39) memahami organisasi merupakan alat yang digunakan oleh orang-orang baik secara individual Maupu kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Kast dan rosenzweigh (dalam maksudi 2017;39) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas.

H.B Siswanto (2013;73) organisasi didefenisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Dalam suatu organisasi mengandung 3 elemen,yaitu:

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama,serta
3. Tujuan bersama.

Richard Scott (dalam Miftah Thoha 2011;35) organisasi adalah sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yng kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung imput dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

James D.Mooney mengatakan organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Chaster I. Barnad adalah suatu sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai, fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan pengadaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapai

tujuan (dalam Zulkifli & Nurmasari 2015;41).

Menurut Siagian (dalam Yussa & Hendry Andry 2015;14) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut John D Millet (Inu Kenana 2003;113) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Dwight Waldo (Inu Kenana 2003;114) mendefenisikan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kombinasi-kombinasi dalam hubungan antar orang-orang pada sistem administrasi.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Defenisi organisasi menurut pendekatan proses, pendapat Massie (dalam Zulkifli & Moris A Yogia 2014;20) yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugas nya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitas-aktifitas nya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007;141) dalam suatu negara administrasi, pemerintah dengan seluruh jajarannya bisa dikenal sebagai abdi masyarakat, dalam bahasa

yang sederhana peran tersebut dapat diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang di perlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ( dalam Hasibuan 2002;5).

Organisasi Publik memiliki banyak definisi, menurut Fahmi (2013:1) sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan di dirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Kemudian Stephen P. Robbin (Dalam Fahmi, 2012:12) mengatakan bahwa organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

#### **b. Unsur-Unsur Organisasi**

Kast dan rosenzweig (dalam maksudi 2017;39) mengatakan bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi bisa berjalan, adapun Unsur-unsur nya adalah:

1. *Goal-Oriented* yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. *Technologica system* yaitu orang yang menggunakan pengetahuan dan teknik.
3. *Structural system* yaitu orang-orang bekerja sama dalam suatu hubungan yang berpola.

4. *Psychosocial system* adalah orang-orang yang berhubungan satu sama lain dalam kelompok kerja.

Berdasarkan pengertian organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan orang yg bekerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sistem koordinasi dan pengaturan guna mendahulukan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Organisasi publik adalah organisasi yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, melayani keperluannya, dan sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

### **3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik**

#### **a. Konsep Manajemen**

Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris ‘*Management*’ dengan kata kerja ‘*To manage*’ yang secara umum dapat dikatakan sebagai mengurus, menegemudikan, mengelola, menjalankan, membina, atau memimpin dengan kata benda’ *management* ‘ dan *manage* yang berarti orang yang melakukan kegiatan (<http://wikipedia.com> diakses 28 Januari 2019).

Menurut Aldag & Stearns dalam Priansa (2014:290) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (dalam Maksudi 2017:78) bahwa manajemen sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Maksudi 2017:79) manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

G.R Terry dalam Priansa (2014:29) menyatakan bahwa usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dalam manajemen, pengaturan dan pengelolaan berkaitan dengan orang metode, material, yang akan digunakan dalam istilah manajemen disebut dengan unsur-unsur manajemen (tool of management). Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan sarana atau alat (tool).

Adapun unsur-unsur manajemen yang menurut GR. Terry dalam Priansa (2014:33) yakni manajemen memiliki dengan istilah The six M terdiri atas:

1. Man (manusia, tenaga kerja) adalah Titik pusat manajemen adalah manusia yang berhak sebagai pelaksana, karena tidak ada manajemen tanpa manusia. Dengan demikian faktor manusia merupakan unsur yang paling penting dan menentukan dalam setiap bentuk kegiatan manajemen. Manusia yang menentukan tujuan, yang menggunakan dan melaksanakan proses kegiatan manajemen. Jadi, manusialah yang semuanya merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi setiap kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Money (uang atau pembiayaan) adalah Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan manajemen adalah uang. Pengaruh uang sangat besar, karena uang dibutuhkan oleh setiap manusia, disamping sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai besar atau kecilnya suatu kegiatan. Suatu perencanaan yang diprogramkan bila tanpa ada unsur pendukung yang akan membiayai dari kegiatan tersebut maka akan sia-sia.
3. Material (bahan-bahan atau perlengkapan) Sebagai perlengkapan dari suatu yang dibutuhkan, maka adanya bahan yang dapat diolah merupakan tindak lanjut dari sebuah proses manajemen. Tanpa adanya material (bahan-bahan), manusia tidak dapat berbuat banyak dalam mencapai tujuannya tanpa adanya material yang akan diproses, tidak mungkin ada wujud dari hasil yang diproses.
4. Machines (mesin-mesin) Adalah alat pelengkap guna memudahkan suatu proses. Selain itu, suatu kegiatan dapat dikatakan cepat dan mudah bila disertai adanya alat sebagai pelengkap. Lebih dari itu, di zaman yang lebih menonjol sisi-sisi kemutakhirannya ditengarai dengan adanya sebuah mesin-mesin yang dianggap canggih sehingga hasil yang diperolehnya dapat efektif dan efisien, seperti halnya komputer, alat tulis menulis dan yang lainnya yang mendukung.
5. Method (metode, cara, sistem kerja) Cara melaksanakan suatu pekerjaan guna pencapaian tujuan yang tertentu, maka penggunaan metode tertentu pula yang akan mengiringinya. Metode guna

pencapaian sesuatu juga sebagai sarana kelancaran dalam merampungkan tugas.

6. Market (pasar) Sebagai hasil dari produktifitas maka akan berakhir juga lingkup yang lebih luas, yaitu pasar. Karena, tanpa kita sadari tujuan produktifitas adalah pemuasan konsumen terhadap barang yang kita hasilkan Peran pasar sangat penting, yakni sebagai tempat untuk memasarkan hasil produksi (barang) dari suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemasaran dalam manajemen ditetapkan sebagai unsur produksi manajemen. Baik buruknya suatu kualitas atau besar kecilnya suatu laba yang akan diperoleh suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat tergantung bagaimana metode penguasaan pangsa pasar itu sendiri.

G. R Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik.

#### **b. Manajemen Publik**

Pengertian manajemen publik menurut para ahli yang akan disebutkan tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut oleh para ahli tersebut. Diantarnya pengertian manajemen publik adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam

menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

2. Menurut Donovan dan Jackson (1991:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (*skill*).
3. Menurut Yeremias T. Keban, mengartikan manajemen publik sebagai upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah
4. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz (1990) mengartikan bahwa manajemen publik adalah upaya untuk memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama.
5. Menurut Overman (1984 ) manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen.
6. Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat

### **c. Fungsi-fungsi Manajemen**

The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009:45) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses terdiri atas enam fungsi yakni :

1. Perencanaan
2. Pembuatan Keputusan
3. Pengarahan
4. Pengkoordinasian

5. Pengontrolan
6. Penyempurnaan

Menurut Rue dan byars, fremot E. Kast dan James E.Rosenzweig bahwa Henry Fayol adalah orang pertama yang mengidentifikasi fungsi manajemen secara spesifik , yang merupakan hal penting dalam berorganisasi, yaitu terdiri dari:

1. *Planning (Perencanaan)* adalah kegiatan-kegiatan Penetapan rencana yang yang dapat dicapai organisasi.
2. *Organizing (Pengorganisasian)* adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi.
3. *Commanding (Kepemimpinan)* adalah kegiatan memotivasi dan memengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
4. *Coordinating (Koordinasi)* adalah kegiatan menyasrakan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dan
5. *Controlling (Pengawasan)* adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu masih banyak lagi dari para pakar, diantaranya George R.Terry (dalam Maksudi 2017:83 ) yang sampai saat ini masih serng digunakan:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan

merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar - berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan pengertian Manajemen dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan Manajemen Publik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas organisasi

secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik bagi masyarakat suatu Negara.

#### **4. Konsep Tanggung Jawab sosial Perusahaan (CSR)**

##### **a. Arti Penting Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Pada dasarnya konsep terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan kepada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti *liability*.

Sedangkan teori tanggung jawab social (*social responsibility theory*) sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna *responsibility*. Filosofi utama dari teori tanggung jawab social sungguh radikal, karena membatasi kebebasan dalam makna positif.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipasi dan aspirasi;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;

- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak :

- a. Menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Riau Pasal 8 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib :

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan prinsip- prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan;

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun progam pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Kartini (2009:54) mengatakan ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran untuk kinerja kunci dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu :

1. *Leadeship* (Kepemimpinan)
  - a. Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top manajemen perusahaan.
  - b. Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan progam.
2. Proporsi Bantuan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dirancang bukan semata mata

pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya juga harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

- a. Terdapat laporan tahunan (*annual report*).
- b. Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dapat ditujukan secara benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan *interview* dengan para penerima manfaat.

4. Cakupan Wilayah

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

- a. Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multi-stakeholder* pada setiap siklus pelaksanaan proyek.
- b. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek- aspek lokalitas (*local wisdom*), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya- budaya lokal yang ada.

- c. Terdapat *blue-print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan program.
6. Pelibatan Stakeholder.
  - a. Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan *stakeholders*, utamanya masyarakat.
  - b. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.
7. Keberlanjutan.
  - a. Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat.
  - b. Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan baik.
  - c. Adanya pilihan *partner* program yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, program bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan *partner* tersebut.
8. Hasil nyata.
  - a. Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai dengan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dipilih oleh perusahaan.
  - b. Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.

c. Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

Indikator keberhasilan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang disampaikan oleh Kartini (2009:54) mengacu terhadap perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pada umumnya merupakan salah satu citra strategi bisnis lalu jika dikaitkan dengan ruang lingkup Administrasi Publik, maka:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)

Melihat sejauh mana kepemimpinan birokrasi atau pun bisa dikatakan sebagai Fasilitator antara perusahaan dan masyarakat dalam menerapkan maupun mendukung Peraturan Daerah maupun Peraturan lainnya yang berkaitan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berupa pelaksanaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP maupun evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah

Begitu pun dengan kepemimpinan Perusahaan melihat sejauh mana dari Kepemimpinan Perusahaan menyatakan secara sadar bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Penting bagi kelangsungan Perusahaan itu sendiri.

2. Proporsi Bantuan

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kesesuaian Serapan perusahaan dengan program tentu harus diperhatikan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 5 tahun 2007 Bab III pada Pasal 9 menyebutkan yakni 2% laba perusahaan yang diperuntukan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah menjadi tatanan umum praktis perusahaan bagi

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pun haruslah sesuai dengan Laba yang didapatkan oleh perusahaan.

### 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Selain harus Adanya laporan tahunan Program yang diberikan perusahaan untuk mengetahui apa saja program yang telah dilaksanakan selama satu periode, Pemerintah selaku fasilitator dalam terlaksananya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pun haruslah adanya Akuntabilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam memastikan terlaksananya peraturan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

### 4. Cakupan wilayah

Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan harus memahami daerah mana saja yang dikatakan sebagai daerah kawasan yang terkena dampak langsung dan tidak terkena dampak langsung yang harus mendapatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) .hal ini pun telah diklasifikasikan didalam ring tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:

1. Ring I : Masyarakat yang Terkena dampak langsung dari aktifitas perusahaan, hal ini bisa dikatakan sebagai prioritas, dalam lingkup kecilnya yakni Desa.
2. Ring II : merupakan masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari aktifitas perusahaan, Hal ini dikatakan sebagai Kecamatan

3. Ring III : Masyarakat yang tidak terkena dampak dari aktifitas perusahaan yakni provinsi

(dalam Davidgandasilalahiwordpress.com diakses Pada 6 agustus 2019).

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Melihat sejauh mana dalam Proses Perencanaan Pemerintah sebagai Fasilitator mengetahui dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) hal-hal apa saja yang bersangkutan tentang keberlanjutan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) baik mengontrol maupun mengevaluasi peraturan yang telah disepakati sebagai proses peningkatan kualitas program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

6. Pelibatan stakeholder

Fungsi Pemerintah sebagai Fasilitator antara perusahaan dan masyarakat tentu menjadi dasar penting melihat program yang dilaksanakan harus memberikan kebermanfaatn terhadap kedua pihak yakni masyarakat maupun perusahaan itu sendiri, Pemerintah pun harus terlibat dan memastikan bahwa program yang dibentuk ataupun yang dilaksanakan terus menerus dilakukan dan berproses demi keberlanjutan program.

7. Keberlanjutan

Keberlanjutan hal yang merupakan keharusan dari sebuah program , pemerintah sebagai fasilitator diharapkan melakukan pembinaan , melaksanakan control terhadap program dan mengevaluasi Program.

## 8. Hasil nyata

Adanya outcome yang didapat ataupun yang ditimbulkan setelah terlaksananya program dan memberikan kegunaan bagi masyarakat maupun perusahaan untuk kehidupan yang lebih baik.

### **b. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Bowem dalam Markinto (2014:86) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai diinginkan

Menurut Davis dalam Markinto (2014:86) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.

Menurut Magnan dan Farrel (dalam Firmansyah 2016:21) mendefenisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai:

*” A business acts in socially responsible manner when its decision and actions accounts for and balance diverse stakeholder interest ”*

Defenisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil melalui perilaku sosial bertanggung jawab.

Menurut Suhandari (2016:1) Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Masyarakat Uni Eropa (dalam Firmansyah 2016:45) pun turut memberikan pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yakni :

*“A concept where by companies decide voluntarily to contribute to a better society and cleaner enviroment”*

Artinya suatu konsep dimana perusahaan memutuskan sukarela untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan yang bersih.

### **c. Manfaat Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR)**

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tentu memberikan manfaat, sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan hanya bisa memberdayakan masyarakat akan tetapi memberikan keuntungan terhadap perusahaan itu sendiri maupun pemerintah secara tidak langsung, Berikut beberapa yang diperoleh dari adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Dalam Wedayanti:2019:63).

#### **1. Manfaat bagi Perusahaan**

Citra perusahaan akan terkenal baik bahwa inilah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masyarakat. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik dimasa yang akan datang, akibatnya, perusahaan memperoleh tanggapan positif setiap kali menawarkan

Sesuatu kepada masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan masyarakat. Karena secara tidak langsung maka produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut membuat konsumen meningkat karena cenderung melihat dari citra perusahaan.

## 2. Bagi Masyarakat

Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik. Tidak hanya di sector perekonomian, tetapi juga dalam sector sosial, pembangunan dan lain-lain. Dan adanya beasiswa terhadap anak tidak mampu dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut akan memberikan hal-hal pada masyarakat:

- a. Kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan meningkat
- b. Tersedianya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada disekitar perusahaan.
- c. Fasilitas umum terjamin pemeliharaannya.
- d. Terdapat kegiatan sosial berupa pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar perusahaan.

### 3. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah tidak hanya bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, karena memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya, pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk tatanan masyarakat agar kearah yang lebih baik dan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagaimana tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah.

Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta yakni perusahaan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mampu berperan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial.

#### **d. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 11 antara lain:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Infrastruktur;
4. Olah raga dan seni budaya;
5. Sosial dan keagamaan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Usaha ekonomi kerakyatan;
8. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Setiap perusahaan yang berada di Provinsi Riau wajib sebagai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dimana Perusahaan yang dimaksud tidak termasuk perusahaan yang sedang merugi dan usaha kecil dan menengah dan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing dan/milik pemerintah daerah.

**e. Langkah-langkah Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 21 antara lain:

- a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- b. Penyusunan rencana dan menentukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- c. Penandatanganan naskah kerjasama program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan apabila melibatkan pihak ketiga;
- d. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- e. Monitoring dan evaluasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan provinsi dan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten/kota.

Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dimana Pelaporan yang dimaksud Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Pasal 28 yakni:

- a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
- d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, dan
- e. Rencana tindak lanjut.

## 5. Konsep Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino 2006:7) menyatakan bahwa kebijakan Publik adalah:

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

James Anderson (dalam Agustino 2006:7) memberikan pendapat tentang kebijakan Publik yakni dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau hal yang diperhatikan”.

David Easton (dalam Agustino 2006:8) kebijakan Publik adalah Keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, maka dari itu mereka menyebut sebagai otoritas.

Dari beberapa Defenisi-Defenisi Kebijakan Publik diatas dapat disimpulkan bahwa (dalam Agustino 2006:8):

1. Kebijakan Publik Perhatian nya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.

2. Kebijakan Publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk Positif maupun Negatif.

#### **b. Sifat Kebijakan Publik**

Dalam Agustino (2006:9) menyebutkan ada beberapa sifat dari kebijakan public sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti dengan baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori:

1. *Policy demands* adalah Permintaan atau kebutuhan yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam system politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decisions* adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat public yang memerintahkan dan mengarahkan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
3. *Policy statements* adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang ditetapkan.
4. *Policy output* adalah hasil atau Perwujudan nyata dari kebijakan public.
5. *Policy outcomes* adalah konsekuensi kebijakan yang diterima oleh masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

### c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan yang dikemukakan Oleh Anderson (1979) dalam ada dua belas macam, sebagai berikut:

1. *Substantive Policies*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan dan hukum.
2. *Procedural Policies*, menyangkut siapa, kelompok mana, dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang ketenagakerjaan, siapa saja dan pihak mana yang terlibat di dalamnya.
3. *Distributive Policies*. Kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan distributive di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian pelatihan pada angkatan kerja.
4. *Redistributive Policies*. Kebijakan yang arahnya memindahkan hak, pemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu. Contoh kebijakan ini memberlakukan pajak yang lebih besar dari barang-barang impor, berbeda dengan produksi dalam negeri. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
5. *Regulatory policies*. Kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Misalnya

pembatasan penjualan obat-obat tertentu, pembatasan pada pemakai jalan pada jalur tertentu.

6. *Self Regulatory Policies*. Kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya bedanya kebijakan ini didukung oleh seseorang atau kelompok orang yang punya kepentingan dengan kebijakan tersebut. Misalnya, izin perdagangan, izin kerja, dan izin mengemudi, dan lainnya.
7. *Material Policies*. Kebijakan yang berkaitan dengan sumber material kepada penerimanya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikan. Misalnya: pemberlakuan pemberian upah minimum kepada pekerja.
8. *Symbolic Policies*. Kebijakan ini tidak memaksa kepada publik, karena dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat. Seringkali kebijakan simbolis ini tidak diikuti oleh masyarakat, karena sebagai simbol saja. Misalnya kebijakan iuran TVRI, radio dan sebagainya.
9. *Collective Good Policies*. Kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Jika diberikan kepada seseorang, kelompok orang, haruslah juga menyediakan untuk semua orang. Contoh kebijakan wajib belajar Sembilan tahun.
10. *Private Good Policies*, merupakan kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi

masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mendapatkan layanan. Contoh kebijakan Rumah Sakit.

11. *Liberal Policies*. Kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan. Perubahan tersebut mengarah kepada pengurangan ketidak-merataan dalam kehidupan masyarakat. Wujud dalam pemberitaan ini mengadakan koreksi atas kelemahan pada aturan yang ada pada masyarakat serta berupaya meningkatkan program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. *Concervative Policies*. Kebalikan dari kebijakan liberal. Kebijakan liberal menuntut adanya perubahan, tapi dalam kebijakan konservatif bertujuan mempertahankan yang ada secara alamiah dan tidak direayasa. Bahkan perubahan diupayakan diperlambat untuk perubahannya.

#### **d. Model Model Kebijakan Publik**

Model kebijakan adalah representatif sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang di susun untuk tujuan tertentu. Menurut Dunn William (2003:232) model kebijakan ada beberapa diantaranya adalah:

1. Model Deskriptif. Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologis dari model. Dua bentuk utama model kebijakan adalah deskriptif dan normatif.

2. Model Normatif. Sebaliknya, tujuan model normatif hanya untuk menjelaskan dan /atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).
3. Model Verbal. Model kebijakan, baik deskriptif maupun normatif, dapat juga dibedakan menurut bentuk ekspresinya. Model-model normatif dan deskriptif dapat diekspresikan didalam tiga bentuk utama yaitu verbal, simbol dan prosedural.
4. Model Simbolis. Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari suatu masalah.
5. Model Prosedural. Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan menstimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin, contoh pertumbuhan ekonomi.
6. Model sebagai pengganti dan perspektif. Dimensi terakhir yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka.

### e. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensuskelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007:16), antara lain :

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain; pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.
2. Peramalan masa depan kebijakana, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual atas dasar informasi yang telah ada mengenai situasi sosial di masa depan tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan, yaitu; akurasi ramalah, kondisi komperatif masa depan dan konteks, yaitu konteks institusional, konteks temporal, dan kontek historikal
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk merekomendasi kebijakanaan, antarlain; efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas pada penciptaan premis-premis nilai, dan kelayakan.
4. Pemantauan hasil kebijakan yaitu untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu; eksplanasim akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan.
5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan, yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat?”. Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan, antara lain; efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

## 6. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster dalam Wahab (2004:64) menyebutkan bahwa implementasi disebutkan:

“Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”

Menurut George Edward III (1980:1) Pelaksanaan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.

Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974:447) dalam Widodo (2006:86) juga menguraikan batasan implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (kelompok) Swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:4) dalam Agustino (2006:139), Implementasi Kebijakan merupakan:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan, eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menginstruksikan atau mengatur proses implementasinya.”

Termasuk pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Agustino (2006:138) :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dalam kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya, mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien”

Dalam bukunya Public policy, Riant Nugroho (2012:494-495) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya Riant nugroho (2012:707) pun mengemukakan prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan yang efektif, disebutkan ada” lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implemmentasi kebijakan yakni:

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksanaannya
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan
5. Tepat proses

Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, ketepatan kebijakan pun dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, tepat pelaksanaannya, actor implemmentasi yang tidak hanya pemerintah melainkan

adanya tiga stakeholder yakni apakah pelaksanaan implementasi yang menjadi pelaksana melakukan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau pun implementasi kebijakan yang diperuntukan khusus untuk mengatur pihak swasta. Ketiga, tepat target, bisa dikatakan bahwa apakah target yang telah diintervensi telah sesuai dengan yang diharapkan atau pun tidak menimbulkan tumpang tindih dengan intervensi lain, maupun menimbulkan permasalahan baru, keempat, tepat lingkungan, keempat, tepat lingkungan, terdapat dua lingkungan yang menentukan yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal, kelima, tepat proses, secara umum terdapat tiga proses yang terdapat didalam implementasi yakni:

1. *Policy acceptance*, dimaksud apakah publik memahami kebijakan,
2. *Policy adoption*, public menerima kebijakan
3. *Strategic readiness*, publik siap melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan

#### **b. Model-Model Implementasi Kebijakan**

Dalam studi kebijakan public banyak model implementasi diantaranya George C. Edwards III (1980), Merilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Wimer dan Aidan R. Vining (1999) dalam tesis Wardan Amdan. (2014:27). Mereka semua menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain yakni dalam Widodo (2006:104) adalah:

### 1. Teori Edward III (1980)

Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down yang diteoremaikan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008:140) yang didalamnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi;
- b. Sumber Daya;
- c. Disposisi;
- d. Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.

#### 2. Sumberdaya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan ataupun aturan

aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak efektif, sumber daya yang tersebut yakni disebutkan yaitu:

- a. Sumber daya manusia, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia karena sekali pun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia yang terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif.
- b. Sumber daya anggaran, dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionaisasi pelaksanaan kebijakan karena terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas
- c. Sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan saranaa yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan, informasi mampu menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau

melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Serta kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan menyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak bias. Dan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan yang sedang di implemtasikan Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

#### a. Pengangkatan birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga Insentif

#### b. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	2	3	4	5	6
1.	Nanang Al Hidayat, Deni Handani, Feri Antoni, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA) , Vol. 3 No. 1 Desember 2018, hlm. 1-12	Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Lingkungan Perusahaan ( <i>Studi pada PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo</i> )	Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif	Pelaksanaan	Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan menyalurkan dana sosial/CSR kepada masyarakat di lingkungan perusahaan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan prioritas pelaksanaan kegiatan tersebut.
2.	Widya Novriza JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017	Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Riau Andalan Pulp And Paper Dalam Penyuksesan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kabupaten Kampar	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan	Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan yang ditetapkan oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper sudah berjalan optimal karena telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Keterlibatan perusahaan didukung dengan sistem manajemen yang baik, sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi dan skill yang sesuai didukung dengan sumber daya finance. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dari adanya program ialah cuaca dan adanya

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	2	3	4	5	6
					masyarakat yang kurang peka terhadap program yang diberikan.
3.	Dedi Risaldi, Ansyari Mone, Rosdianti Razak Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar	Kualitatif	Pelaksanaan	Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan CSR di perusahaan ini merupakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengedepankan sistem pemberian pinjaman lunak secara berkelanjutan kepada para pengusaha kecil dalam rangka memajukan usaha kecil dan pemberian bantuan seperti pembangunan masjid, jalan, kesehatan dan pendidikan.
4.	M. Deddy Arianto, DR. Achmad Djumlani, M.Si, Dra. Rosa Anggraeny, M.Si Jurnal Administrasi Reform, Vol.1 No.2, Tahun 2013	Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibilities (CSR) PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Bontang Lestari	Kualitatif	Pelaksanaan	Antusiasme Masyarakat dalam menerima bantuan CSR sangat besar, hal ini disebabkan etos / semangat kerja yang tinggi untuk melakukan perubahan taraf hidup yang lebih baik. Dari seluruh responden yang disurvei menyatakan bahwa aktivitas mata pencaharian sehari – hari hanya fokus pada satu profesi saja. Sebagai langkah nyata terhadap dukungan pengembangan UMKM, PT. Indo

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	2	3	4	5	6
					Tambangraya Megah Tbk membentuk HITIM Mart ( Home Industry Tim Indominco mandiri ), sebuah mini market yang khusus menjual aneka produk binaan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk seperti keripik ikan teri borneo, sirup jahe, manisan / dodol rumput laut.
5.	Herman Firmando Jom Fisip Vo. 2 No. 1 Februari 2015	Pelaksanaan Program CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina (Persero) Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan	Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan key informan serta beberapa informan susulan dan dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Program CSR (Coporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina (Persero) Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan cukup maksimal. Cukup maksimal didapatkan dari wawancara dan observasi lapangan mengenai aspek-aspek atau bidang CSR tersebut

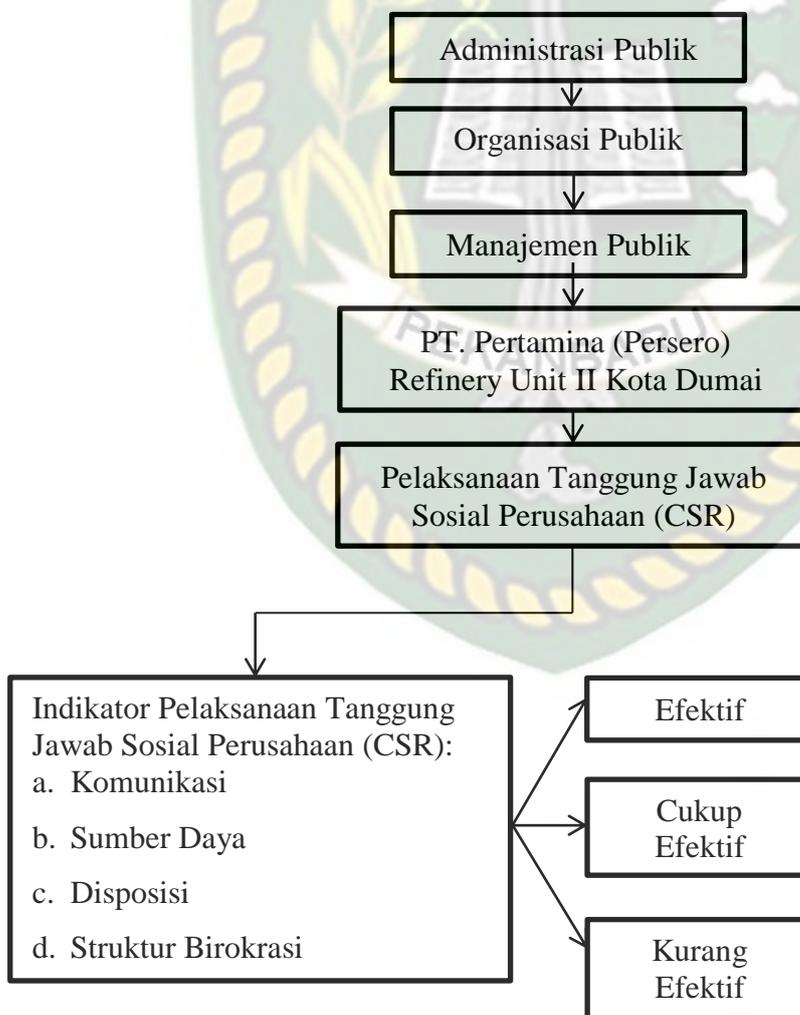
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### C. Kerangka Pikir

Untuk lebih memudahkan dalam proses penganalisisan permasalahan dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran, adapun skema kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian tentang Analisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

#### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman 2012:9 ) dan Administrasi Publik Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public.”
- b. Organisasi adalah unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaigus berlangsungnya berbagai aktivitas ( proses ) bagi pencapaian tujuan (dalam Wirman 2012:12)
- c. Manajemen adalah Proses dari Perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (priansa 2013:29).
- d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui

kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan Menurut Davis dalam Markinto (2014:86)

- e. Kebijakan Publik, Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau hal yang diperhatikan menurut James Anderson (dalam Agustino 2006:7)
- f. Implementasi Kebijakan Publik merupakan Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan, eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menginstruksikan atau mengatur proses implementasinya. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:4) dalam Agustino (2006:139)
- g. Komunikasi  
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

h. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

i. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

j. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi apabila adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor

dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel 2.2 Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item Pertanyaan	Skala Penilaian
Menurut George Edward III (1980:1) Pelaksanaan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pelaksanaannya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.	Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai	Komunikasi	a. Kejelasan Komunikasi b. Kesulitan Komunikasi	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		Sumber Daya	a. Adanya Sumber Daya Anggaran b. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		Disposisi	a. Masalah yang Dihadapi b. Perubahan yang Dihadapi	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		Struktur Birokrasi	a. Adanya Pengawasan b. Adanya Evaluasi	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

## F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dan menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi tiga yaitu: Efektif, Cukup Efektif, dan Kurang Efektif.

**Efektif** : Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai 67% - 100%

**Cukup Efektif**: Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai 34% - 66%

**Kurang Efektif**: Apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indikator dari Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai 0% - 33%

Sedangkan untuk pengukuran variabel digunakan kategori sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

**Efektif** : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 67% - 100%

**Cukup Efektif**: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada

indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34% - 66%

Kurang Efektif: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0% - 33%

## 2. Sumber Daya

Efektif : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 67% - 100%

Cukup Efektif : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34% - 66%

Kurang Efektif: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0%-33%

## 3. Disposisi

Efektif : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 67% - 100%

Cukup Efektif: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34% - 66%

Kurang Efektif: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada

indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0% - 33%

#### 4. Struktur Birokrasi

Efektif : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 67% -100%

Cukup Efektif : Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 34% - 66%

Kurang Efektif: Apabila akumulasi dari persentasi item penilaian pada indikator komunikasi dapat dilaksanakan atau jawaban pada interval antara 0% - 33%

Adapun Program-Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan oleh PT. Pertamina RU II Dumai terdiri dari 5 bidang, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur dan bencana alam, dan pemberdayaan masyarakat.

##### 1. Bidang kesehatan,

Pada tahun 2014 PT. Pertamina RU II Dumai memberikan bantuan 18 unit alat fogging untuk dinas kesehatan kota Dumai. Kemudian pada tahun 2016 memberikan bantuan alat kesehatan berupa puseskesmas keliling bagi warga Kelurahan Tanjung Palas. Dari bidang kesehatan ini terdapat juga program terbaru dari bantuan CSR PT.Pertamina meliputi : program posyandu sehati, program penambahan alat kesehatan, program penyehat granese, program

BANK sampah, dan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Serta program kemitraan dan aneka pelatihan yang berjibun. (sumber: pantaورياu.com)

2. Bidang infrastruktur dan bencana alam,

Program tersebut terealisasi di Kelurahan Teluk Binjai dalam merenovasi gedung LAMR, kemudian di Kelurahan Tanjung Palas dilakukan semenisasi bahu Jalan Tanjung Jaya, dan juga pembangunan mesjid Durunnafis Kelurahan Jaya Mukti pada tahun 2016.

3. Bidang lingkungan hidup,

PT. Pertamina RU II Dumai turut mendukung program Pemko Dumai untuk meraih piala Adipura di aplikasikan dalam bentuk pemberian tong sampah pada tahun 2014. Dilaksanakannya penanaman ribuan batang mangrove di sepanjang bibir pantai purnama yang berdampak pada pelestarian lingkungan dan menjaga keberagaman hayati pada 2016.

4. Bidang pendidikan

PT. Pertamina RU II Dumai memberikan bantuan berupa laboratorium kepada SMKN 2 Dumai, sarana perpustakaan SD 09 di kelurahan tanjung palas dan SD 013 Binsus di kelurahan teluk binjai pada tahun 2013-2014. Memberikan beasiswa untuk Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 132 siswa yang masing-masing siswa mendapatkan Rp.886.000 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 100 siswa yang masing-masing siswa mendapatkan Rp.1.200.000 dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 50 siswa mendapatkan Rp.1.800.000 dan ada juga beasiswa untuk

mahasiswa S1 yang berprestasi sebanyak 25 orang, untuk yang kurang mampu sebanyak 5 orang pada kampus kota Dumai. PT. Pertamina RU II Dumai juga memberikan bantuan berupa sertifikat dan muzakarah Dai Angk.III Dumai pada tahun 2016. Dan bantuan CSR terbaru di bidang pendidikan terbaru sampai tahu ini yaitu, bantuan pembangunan gedung belajar SD Cemerlang dan pelatihan tenun melayu lengkap dengan alat pintal (sumber : pantaورياu.com)

5. Bidang pemberdayaan masyarakat,

Terbagi atas 2 kelompok yaitu:

1) kelompok Adelis yang bergerak di Jaya Mukti yang bergerak di bidang konveksi, menjahit, dan kerajinan tangan;

2) Kelompok Usaha Berkah di Kelurahan Tanjung Palas yang bergerak di bidang budi daya jamur tiram. PT. Pertamina juga memberikan 5 buah kolam lele/gurami yang disertai dengan pakan dan vitamin ikan senilai Rp.50.000.000. Kemudian pada tahun 2017 PT. Pertamina RU II Dumai memberikan bantuan berupa 50 kios untuk pedagang keripik cabai yang berada di pasar lepin. Dan bantuan CSR terbaru dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan kelompok nelayan di tanjung palas. Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan alat tangkap jaring, alat tangkap rawai, perbaikan kapal nelayan, hingga alat canggih yang modern yaitu fish finder. (sumber: Monitor).

PT Pertamina RU II Dumai ini memiliki 4 pilar untuk melaksanakan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yaitu:

1. Pertamina Cerdas yang berkaitan dengan pendidikan
2. Pertamina Berdikari yaitu Program CSR yang bertujuan untuk mengkreasikan masyarakat mandiri
3. Pertamina Sehat berkaitan dengan kesehatan
4. Pertamina Hijau yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Salah satu dari keempat pilar yang dilaksanakan oleh perusahaan ini yaitu pada Pertamina Cerdas yang bergerak di bidang Pendidikan yang salah satu programnya ialah beasiswa. PT Pertamina RU II Dumai ini menyadari bahwa Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan berperan aktif memajukan Pendidikan melalui pemberdayaan siswa/mahasiswa dalam berbagai pelatihan soft skill untuk membentuk manusia yang disiplin, mandiri, dan berwawasan masa depan serta menjadi pemimpin yang cakap intelektual. Namun, yang menjadi permasalahan dari program beasiswa ini ialah sebagian masyarakat sekitar lingkungan perusahaan yang kurang mendapatkan informasi atau kurangnya sosialisasi terkait beasiswa yang dibuat oleh perusahaan, sehingga tidak mengetahui bahwasannya program beasiswa itu ada.

Berikut pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Dumai kepada masyarakat setempat menurut laporan 2018/2019:

**Tabel 2.3 Program Pelatihan PT Pertamina RU II Dumai**

Program	KEGIATAN PELATIHAN			Outcome	Penerima Manfaat yang Berhasil Menerapkan Program	Bukti
	Nama Pelatihan	Waktu dan Tempat	Peserta			
Anggrek Maju Bersama	Pelatihan Pengolahan Labu Menjadi Keripik	Kamis, 13 Juni 2019 Dan Rumah Produksi UMKM Anggrek Maju Bersama	13 Orang	Peserta pelatihan mendapat pengetahuan dalam mengolah labu menjadi keripik yang kemudian mejadi produk “Keripik Halloween ”	Zulfikar Samsidar Vina Saragi Marneli Asnelfi Hj Emiati Asnawati Robby Hermawan Khadijah Octavia Dewi	Absensi
Setia Kawan	Pelatihan Hama Tanaman	Juli 2019 Dan Saung Pertanian Bukit Mekar	15 Orang	Peserta pelatihan mendapat wawasan baru terkait hama tanaman sehingga dapat mencegah dan menanggulangi hama tersebut	Rahayu Eka Jumita Rosa Derita L Dani Candra Suwito L. Raja Abu Kasim Zahmad Herlina Siti Hendry Robby Dedi Hermanto Giat Mukit	Absensi

					Khamisan Jumadi Wahid Willy Andri	
Setia Kawan	Pelatihan Pembuku an	Rabu, 21 Agustus 2019 Dan Balai Pertemua n Sasana Mitra	15 Orang	Peserta pelatihan mendapat pengetahua n terkait pembukuan untuk mempermu dah kalkulasi keuangan kelompok	Siti Dani Dedi Hermanto Giat Mukit Khamisan Jumadi Wahid Agus Nasib Hamada Sugiarto Tora Jumadi B Suwito	Absensi
Bukit Mekar	Pelatihan Pembuku an	Rabu, 21 Agustus 2019 Dan Balai Pertemua n Sasana Mitra	15 Orang	Peserta pelatihan mendapat pengetahua n terkait pembukuan untuk mempermu dah kalkulasi keuangan kelompok	Siti Dani Dedi Hermanto Giat Mukit Khamisan Jumadi Wahid Agus Nasib Hamada Sugiarto Tora Jumadi B Suwito	Absensi

Sumber: laporan PT Pertamina RU II Dumai

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, dan didapat melalui hasil wawancara dengan key informan dan informan, dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta menganalisa sehingga diperoleh perumusan terhadap masalah yang dihadapi.

Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat keadaan atau gabungan dari kualitas objek yang diteliti, golongan data ini disebut atribut, sebagai contoh data mengenai kualitas suatu produk yaitu baik, sedang dan kurang.

#### B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan bukan tanpa alasan mengenai pelaksanaan program Tanggung Jawab sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai. Alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa fenomena program Tanggung Jawab sosial Perusahaan di PT Pertamina. Letak PT Pertamina ini di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dimana daerah tersebut yang merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktifitas perusahaan,

yang bisa dikatakan sebagai prioritas yang termasuk dalam klasifikasi Ring I.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006;130) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Humas (Communication. Relations & CSR) yang terdapat pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.

Sampel menurut Sutrisno Hadi adalah sebagian individu yang di selidiki dari keseluruhan penelitian (dalam Narbuko dan Abu Achmadi 2008;107).

**Tabel 3. 1 Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentasi
1	General Manager RU II Dumai	1	1	100%
2	Unit Manager Comm, Rel, & CSR RU II Dumai	1	1	100%
3	Staff Koordinator Comm, Rel, & CSR RU II Dumai	6	6	100%
4	Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1	1	100%
5	Masyarakat Penerima Manfaat	30	15	50%
	<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>-</b>

*Keterangan : Data Olahan Penulis 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sensus, Menurut Sugiyono (2015;53) sensus adalah teknik penentuan sampel bila pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

Sampel dalam penelitian ini: untuk General Manager RU II Dumai, Unit Manager dan Staff Koordinator Comm, Rel, & CSR RU II Dumai penulis menggunakan teknik penarikan sampel sensus adapun penarikan sampel sensus ialah teknik penarikan sampel dengan menarik seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel

Untuk Masyarakat, penulis menggunakan teknik Purpose Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini termasuk dalam deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat pendapat-pendapat ataupun sifat-sifat individu kelompok tertentu. Dan menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara fenomena satu dan fenomena lainnya di masyarakat, sedangkan eksplanatif dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat menjelaskan mengapa suatu gejala atau fenomena tersebut bisa terjadi.

Adapun sumber data yang dapat peneliti utarakan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai .

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku serta dokumen yang berkaitan tentang masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu dengan permasalahan penelitian termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi atau pengamatan, yakni melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara, metode ini hanya dilakukan sebagai pelengkap sepanjang yang menyangkut data yang sulit didapat melalui daftar wawancara yang dilakukan kepada Camat Dumai Timur, Lurah, Communication Relations (Comm. Rel) & CSR RU II Dumai, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.
3. Dokumentasi, yakni dokumen resmi terkait permasalahan yang diangkat dalam hal ini seperti dokumen data tahun 2016-2021.

## G. Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014:19) analisis data dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari tiga jalur yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Berikut dipaparkan masing-masing proses tersebut.

### 1. Data reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis. Data melalui reduksi data. Meeduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data*

*for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *Looking at display help us to understand what is happening and to do some thing-further analisis or caution on that understanding*" Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

### 3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang alid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Analisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.**

N O	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																				
		Agt-Sep				Okt-Nov				Des-Jan				Feb-Mar				Apr-Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisoner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi revisi skripsi																					
10	Ujian konfrehensi skripsi																					
11	Revisi skripsi																					
12	Pengadaan skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola *lading* minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

Pada tahun 1969 didirikannya sebuah unit pengolahan bahan bakar minyak, dinamakan Kilang Unit Pengolahan II yang dikelola oleh Kontraktor Jepang, Ishikawajima Harima Industries Co. Peresmian pengoperasian kompleks kilang seluas 360 hektare ini dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 8 September 1971. Selanjutnya pada tahun itu dibangun dua Unit Proses, yaitu *Naptha Rerun Unit* dan *Hydrocarbon Platforming Unit*. Dua unit ini selesai dan dioperasikan pada tahun 1973. Kilang Unit Pengolahan II Dumai memiliki 14 unit proses produksi pengolahan dan dua unit penunjang proses produksi. Kilang minyak Unit Pengolahan II Dumai terdiri atas kilang lama (*Existing Plant*) dan kilang baru (*New Plant*). Existing Plant terdiri atas 3 unit proses, yaitu *Crude Distilling Unit*

(CDU), *Naphtha Rerun Unit* (NRU), dan *Hydrobon Platforming Unit* (*Platforming I*).

*New Plant (Hydrocracker Complex)* merupakan perluasan dari *Existing Plant* yang dibangun pada tahun 1981. Pengoperasiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto, 16 Februari 1984. *New Plant* terdiri atas 11 unit proses produksi, yaitu *High Vacuum Unit* (HVU), *Delayed Coking Unit* (DCU), *Hydrocracking Unit* (HCU), *Naphtha Hydrotreating Unit* (NHDTU), *CCR Platforming Unit*, *Destillate Hydrotreating Unit* (DHDtU), *Amine & LPG Recovery Unit*, *Hydrogent Plant*, *Nitrogen Plant*, dan *Sour Water System Plant*. Sedangkan dua unit penunjang produksi adalah Instalasi Tanki dan Pengapalan, dan *Utilities Unit*.

Sementara itu Kilang Sei Pakning terletak di tepi pantai Sungai Pakning dengan areal seluas 40 hektare. Kilang minyak ini dibangun pada November 1968 oleh Kontraktor Refican Ltd. (*Refining Associates Canada Limited*). Selesai dibangun dan mulai berproduksi pada bulan Desember 1969. Pada awal beroperasi kapasitas produksi 25.000 barrel per hari. Pada September 1975 seluruh operasi Kilang Sei Pakning beralih dari *Refican* kepada Pertamina. Selanjutnya kilang ini mulai mengalami penyempurnaan secara bertahap sehingga kapasitas produksinya dapat lebih ditingkatkan. Pada akhir 1977 kapasitas produksi meningkat menjadi 35.000 barrel per hari dan April 1980 naik menjadi 40.000 barrel per hari. Kemudian mulai 1982 kapasitas produksi sesuai dengan desain, yaitu 50.000 barrel per hari. Bagian operasi Kilang Sungai Pakning terdiri atas: *Crude Distilling Unit* (CDU), Instalasi Tanki dan Pengapalan (ITP), *Utilities*,

dan *Laboratorium*.

Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “*Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia*“. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Penamaan pabrik pengolahan bahan bakar minyak yang dulunya disebut Unit Pengolahan diganti menjadi Refinery Unit (RU). Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta No.10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH.

Pada 2017, salah satu langkah nyata mewujudkan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia adalah keberhasilan menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P). Terhitung mulai 1 Februari 2017 melalui anak usaha PT Pertamina International EP, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas M&P dengan 72,65% saham. Melalui kepemilikan saham mayoritas di M&P, Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang tersebar di 4 benua. Pada masa mendatang, Pertamina menargetkan produksi 650.000 *Barrels of Oil Equivalent Per Day* (BOEPD) di 2025 dari operasi internasional, sebagai bagian dari target produksi Pertamina 1,9 juta BOEPD di 2025, dalam upaya nyata menuju ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

Sejarah berdirinya PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai, pembangunan kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai dilaksanakan tanggal 20 April 1969 atas dasar persetujuan “ Turn Key Project” merupakan hasil kerjasama Pertamina dengan Far East Sumitomo Slove Kaisha yang merupakan kontraktor jepang, kilang ini dikukuhkan dalam surat keputusan direktur utama PT. Pertamina (Persero) Nomor 334/ Kps/DM/1967. Letak dari PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai ini di Jl. Raya Kilang Putri Tujuh, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau.

#### **B. Visi dan Misi Perusahaan**

##### 1. Visi Perusahaan

Visi dari PT Pertamina (Persero) adalah:

“Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.”

Visi PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai adalah sebagai berikut:

“Menjadi kilang minyak dan petrokimia yang kompetitif di Asia Tenggara”.

##### 2. Misi Perusahaan

Misi dari PT Pertamina (Persero) adalah:

“Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat”.

Misi PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai adalah sebagai berikut:

“Melakukan usaha dibidang pengolahan minyak bumi dan petrokimia yang dikelola secara profesional dan kompetitif berdasarkan tata nilai 6C (*Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial dan Capable*) untuk

memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja dan lingkungan”.

Saat ini PT Pertamina sudah memiliki 7 Refinery Unit (RU) di seluruh Indonesia, antara lain:

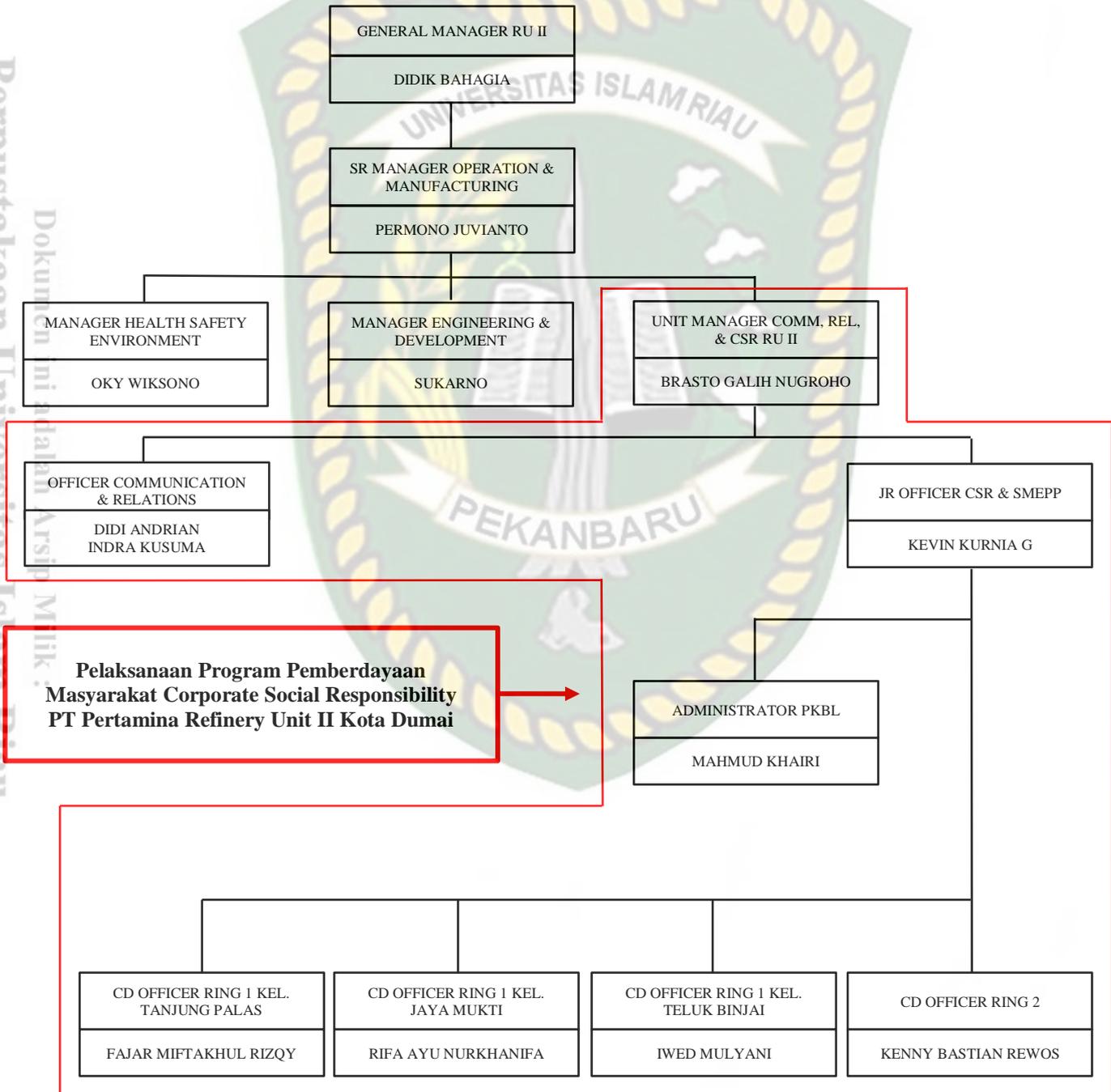
1. RU I di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Unit Pengolahan yang berada di Brandan ini berhenti beroperasi dikarenakan Input minyak mentah maupun gas yang sedikit sehingga sudah tidak bernilai ekonomis lagi.
2. RU II di Dumai dan Sei Pakning, Riau.
3. RU III di Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan.
4. RU IV di Cilacap, Jawa Tengah.
5. RU V di Balik Papan, Kalimantan Timur.
6. RU VI di Balongan, Jawa Barat.
7. RU VII di Kasim Sorong, Papua.

### C. Struktur Organisasi

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pelaksana Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Refinery Unit II Kota Dumai**



**STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
PT PERTAMINA REFINERY UNIT II DUMAI  
2020**



Sumber : PT Pertamina RU II Kota Dumai, 2020

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

##### 1. Identitas Key Informan dan Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan memahami akan keadaan maupun permasalahan yang peneliti teliti dan memberikan interpretasi terhadap objektivitas dalam Penelitian “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai”.

Pada identitas dalam penelitian kali ini dapat dideskripsikan menjadi 4 (empat) bagian klasifikasi, yakni nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dimana klasifikasi yang diberikan diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas dan dapat mampu mendukung data dari penelitian ini dan agar dapat memberikan jawaban, keterangan, juga informasi yang benar – benar adanya. Adapun key informan dan informan yang peneliti tarik juga didasari dengan wilayah kerja tingkat Pemerintah, Perusahaan, Kelurahan, RT, dan masyarakat penerima manfaat.

Adapun identitas key informan dan informan yakni sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Identitas Key Informan dan Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1	Bambang Imawan	Laki – laki	32 TH	Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai
2	Iwed Mulyani	Perempuan	26 TH	Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai
3	Indra Gunawan S. Sos M.IP	Laki – laki	42 TH	Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
4	Aga Muhaimin, A.md	Laki – laki	37 TH	Lurah Tanjung Palas
5	Ramli	Laki – laki	57 TH	Masyarakat

*Sumber : Modifikasi peneliti dari hasil wawancara 2021*

Dari tabel diatas yang menjadi Key Informan yakni bapak Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, sebagai key informan yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni Lurah Tanjung Palas yang menjadi satuan tugas kewilayahan yang berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat kelurahan tanjung palas dalam

menunjang kelancaran penyelenggaraan program-program CSR, RT sebagai gerbang informasi pertama dari masyarakat, dan masyarakat kelurahan Tanjung Palas.

**B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

Dalam pembahasan pada Bab ini, diuraikan hasil hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai. Peneliti mendapatkan data berupa hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yakni Key Informan dan informan. Narasumber tersebut yakni Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang dianggap menjadi sebagai data priemer, dan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi di PT Pertamina RU II Kota Dumai dan Kelurahan Tanjung Palas berupa data, struktur organisasi lainnya,

Wawancara juga berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber yang sangat mendukung penelitian terhadap permasalahan yang dijumpai yakni berfokus kepada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai.

Adapun pertanyaan – pertanyaan meliputi indikator yang sesuai dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai yakni berupa variabel penelitian yang menjadi landasan dari konsep penelitian yakni meliputi :

#### 1. **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran tersebut. Melihat sejauh mana keberhasilan Perusahaan dengan masyarakat dalam menerapkan maupun mendukung Peraturan Daerah yang berkaitan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yakni Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 , begitu pun dengan Komunikasi Perusahaan melihat sejauh mana dari Komunikasi Perusahaan menyatakan secara sadar bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan penting bagi kelangsungan Perusahaan itu sendiri.

Adapun peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa narasumber yakni Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada 8 - 11 Juli 2021.

Wawancara langsung yang peneliti lakukan terkait dengan topik

pembahasan yang peneliti gali informasinya dari beberapa informan terkait dengan indikator dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai, yang memiliki beberapa sub-sub indikator yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Dari wawancara yang diperoleh peneliti, mereka memberikan pernyataannya dari pertanyaan yang peneliti tanyakan sebagai berikut :

a. Kejelasan Komunikasi

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai dalam pelaksanaannya, adanya koordinasi dan pelibatan komunitas, pemerintah dan masyarakat?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: sudah ada, jadi koordinasi itu pasti ada sama pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian dari sektor pemerintahan dan lembaga pendidikan. Jadi koordinasi ini dilaksanakan pada bulan maret awal tahun, dimana perusahaan merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaatnya. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,

& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: untuk koordinasi itu pasti ada sama pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian dari sektor pemerintahan dan lembaga pendidikan. Jadi koordinasi ini dilaksanakan pada bulan maret awal tahun, dimana perusahaan merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaatnya. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: sudah ada, terutama seperti adanya kelompok tani dan kelompok nelayan dan sudah ada juga istilah MoU ( nota kesepahaman) dari pihak perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dibina. Termasuk juga dengan kader-kader di kampung KB dan mitra persada sudah ada MoU ( nota kesepahaman) mengenai program dari CSR tersebut. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: belum ada koordinasi dari perusahaan karna forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) baru dibentuk pada desember tahun 2020 di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Dumai. Jadi semenjak di dinas dpmpptsp ini baru ada wadah forum TJSP ini yang membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut terhadap daerah. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: sudah ada, PT Pertamina RU II Kota Dumai telah menyampaikan informasi mengenai apa saja bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ingin diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk program yang perusahaan berikan yaitu budidaya ternak lele (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membahas Kejelasan Komunikasi, hasil dari penjangingan aspirasi dan keinginan masyarakat terlaksa dengan Cukup Efektif. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai telah membahas gambaran mengenai program-program CSR yang sifatnya lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat. Terutama seperti adanya kelompok tani dan kelompok nelayan dan sudah ada istilah MoU ( Nota Kesepahaman) dari pihak perusahaan kepada kelurahan serta kelompok-kelompok yang dibina. PT Pertamina RU II Kota Dumai juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan

kelompok masyarakat dalam merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaatnya sesuai dengan aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat terhadap program-program apa saja yang dibutuhkan. Akan tetapi, Perusahaan sejauh ini belum ada berkoordinasi kepada forum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) mengenai kejelasan dari program-program apa yang telah dirumuskan bersama komunitas, pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Bahkan selama terbentuknya forum CSR pada akhir desember 2020, pihak perusahaan tidak mengetahui bahwasannya forum CSR itu sudah ada di kota Dumai.

b. Kesulitan Komunikasi

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai memiliki kendala akan pelibatan komunitas dan masyarakat?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: kalau untuk pelibatan komunitas dan masyarakat sejauh ini tidak ada kendala, karna sebelum memberikan program-program CSR kepada masyarakat, perusahaan terlebih dahulu merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas beserta masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi kendala untuk saat ini yaitu perusahaan kurang berkomunikasi kepada instansi pemerintahan. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,

& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: kalau untuk pelibatan komunitas dan masyarakat sejauh ini tidak ada kendala, karna sebelum memberikan program-program CSR kepada masyarakat, perusahaan terlebih dahulu merumuskan rencana kerja*

*tahunan bersama komunitas beserta masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi kendala untuk saat ini yaitu perusahaan kurang berkomunikasi kepada instansi pemerintahan. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: tidak ada kendala, sebelum turun ke lapangan pihak perusahaan menjelaskan secara rinci apa saja program-program CSR yang disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat beserta LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: sejauh ini tidak ada kendala mengenai pelibatan komunitas dan masyarakat mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Pertamina Refinery Unit II Kota Dumai. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: iya perusahaan secara transparan (terbuka) dalam menyampaikan program-program CSR apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa PT Pertamina RU II Kota Dumai dalam Kesulitan Komunikasi terlaksana cukup efektif. Dalam menyampaikan informasi mengenai program-program CSR PT Pertamina RU II Kota Dumai ini tidak ada kendala terkait penyampaian informasi tersebut terhadap komunitas dan kelompok masyarakat. Karna sebelum memberikan program CSR, perusahaan terlebih dahulu merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas beserta masyarakat penerima manfaat. Namun yang menjadi kendala perusahaan saat ini yaitu berkomunikasi kepada instansi pemerintah terkait penyampaian CSR tersebut.

Hal ini dikarenakan pada saat perusahaan ingin melaksanakan musyawarah tentang program-program yang ingin disalurkan kepada kelompok masyarakat, pihak perusahaan sudah mengundang instansi pemerintahan untuk berdiskusi terkait program CSR ini, namun tidak ada respon dari instansi pemerintahan. Akan tetapi, dari masyarakat penerima manfaat langsung sudah ada merespon. Jadi perusahaan berinisiatif mengambil langkah terbaik untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu langsung mengundang kelompok masyarakat untuk bermusyawarah tentang penyampaian informasi terkait program-program apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai dalam menyampaikan komunikasi terlaksana cukup efektif sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai sebelum memberikan program CSR, perusahaan membahas terlebih dahulu gambaran mengenai program-program CSR yang sifatnya lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat. Terutama seperti adanya kelompok tani dan kelompok nelayan dan sudah ada istilah MoU ( Nota Kesepahaman) dari pihak perusahaan kepada kelurahan serta kelompok-kelompok yang dibina. PT Pertamina RU II Kota Dumai juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan kelompok masyarakat dalam merumuskan rencana kerja tahunan bersama komunitas, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaatnya sesuai dengan aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat terhadap program-program apa saja yang dibutuhkan. Namun yang

menjadi kesulitan perusahaan dalam berkomunikasi untuk saat ini yaitu kepada instansi pemerintahan terkait penyampaian program-program CSR tersebut.

Hal ini dikarenakan pada saat perusahaan ingin melaksanakan musyawarah tentang program-program yang ingin disalurkan kepada kelompok masyarakat, pihak perusahaan sudah mengundang instansi pemerintahan untuk berdiskusi terkait program CSR ini, namun tidak ada respon dari instansi pemerintahan. Jadi perusahaan berinisiatif mengambil langkah terbaik untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan langsung mengundang kelompok masyarakat untuk bermusyawarah tentang penyampaian informasi terkait program-program apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang telah peneliti lakukan terkait dengan topik Sumber Daya, adapun peneliti beberapa pertanyaan pada sub-sub indikator sebagai berikut :

- a. Adanya sumber daya anggaran

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai dalam pelaksanaannya memiliki dan menyampaikan hasil laporan tahunan dan berkelanjutan atas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: kalau untuk program CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero), kemudian untuk keberlanjutan program itu pasti ada, sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan social mapping (pemetaan sosial). Hasil dari pemetaan sosial itu nanti dapat rekomendas dariii program dan kegiatan, dimana hasil dari rekomendasi ini dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi). Jadi inilah pedoman pelaksanaan CSR berkelanjutan selama 5 tahun. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,

& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT. Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero) nya, kemudian untuk keberlanjutan program itu pasti ada, sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan social mapping (pemetaan sosial). Hasil dari pemetaan sosial itu nanti dapat rekomendasi program dan kegiatan, dimana hasil dari rekomendasi ini dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi). Jadi inilah pedoman pelaksanaan CSR yang berkelanjutan selama 5 tahun. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: sudah ada, jadi perusahaan telah menyampaikan hasil laporan tahunan dan berkelanjutan terkait program Tanggung Jawab Sosial*

*Perusahaan (CSR) yang ingin disalurkan ke masyarakat melalui kelurahan beserta LPMK, kemudian perusahaan menyampaikan hasil tersebut berbentuk laporan rincian mengenai program-program apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat setiap tahun beserta rincian total keseluruhan anggarannya. Jadi hingga saat ini program yang telah diberikan oleh perusahaan sudah tersalurkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dari MoU (nota kesepahaman) yang sebelumnya telah disampaikan oleh perusahaan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebagian besar sudah tersalurkan. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: sejauh ini perusahaan belum ada melaporkan hasil laporan tahunan dan berkelanjutan atas program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: alhamdulillah sejauh ini tepat sasaran terutama parit atau drainase, kemudian budidaya ternak lele, bantuan untuk mesjid setiap tahun, alat gotong royong, dan mesin untuk memotong rumput. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membahas adanya sumber daya anggaran dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksa dengan Cukup Efektif. Jadi untuk program CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero), kemudian untuk keberlanjutan program itu pasti ada, sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan

social mapping (pemetaan sosial). Jadi dari hasil pemetaan sosial yang dilakukan itu nanti dapat rekomendasi dari program dan kegiatannya, dimana hasil dari rekomendasi ini dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi). Kemudian inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan selama 5 tahun.

Terkait program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang ingin disalurkan ke masyarakat ini langsung disampaikan melalui kelurahan beserta LPMK, kemudian perusahaan menyampaikan hasil tersebut berbentuk laporan rincian mengenai program-program apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat setiap tahun beserta rincian total keseluruhan anggarannya. Namun sejauh ini perusahaan belum ada melaporkan hasil laporan tahunan dan berkelanjutan atas program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dilaksanakan oleh perusahaan kepada forum TJSP, dikarenakan perusahaan tidak mengetahui sama sekali bahwasannya forum TJSP tersebut ada di kota Dumai.

b. Sarana dan prasarana yang dimiliki

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adanya pelibatan komunitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan aksi?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: iya ada, apalagi di tahun 2021 ini tuntutan nya terkait stakeholder bersama pemangku kepentingan. Cuma sejak tahun lalu juga perusahaan merangkul pemerintah setempat minimal lurah kemudian kecamatan dan balik lagi terkait penerimaan manfaat langsung program CSR ini yaitu masyarakat. Jadi secara tidak langsung juga pelaksanaan kegiatan CSR ini dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat mengajukan proposal terus kemudian dana CSR itu cair, mereka yang berhak secara SOP memiliki tanggung jawab penuh atas bantuan CSR tersebut. Salah satu contoh kegiatan CSR yaitu tentang pertanian pihak perusahaan juga merangkul Dinas Pertanian, kalau kegiatan pemadam kebakaran pihak perusahaan menggandeng BPBD, jadi tergantung dari kegiatan program CSR itu sendiri. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,

& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: iya ada, di tahun 2021 ini tuntutan nya terkait stakeholder bersama pemangku kepentingan. Cuma sejak tahun lalu juga perusahaan merangkul pemerintah setempat minimal lurah kemudian kecamatan dan balik lagi terkait penerimaan manfaat langsung program CSR ini yaitu masyarakat. Jadi secara tidak langsung juga pelaksanaan kegiatan CSR ini dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat mengajukan proposal terus kemudian dana CSR itu cair, mereka yang berhak secara SOP memiliki tanggung jawab penuh atas bantuan CSR tersebut. Salah satu contoh kegiatan CSR yaitu tentang pertanian pihak perusahaan juga merangkul Dinas Pertanian, kalau kegiatan pemadam kebakaran pihak perusahaan menggandeng BPBD, jadi tergantung dari kegiatan program CSR itu sendiri. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: sudah ada, terakhir ini perusahaan melibatkan kelurahan beserta kelompok masyarakat terkait pembangunan drainase di jalan lintas desa tanjung jaya dan juga jalan siliwangi bersama LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yg jadi pelaksananya. Dan pada tahun 2021 ini juga diajukan lagi untuk penyambungan drainase karna program ini bertahap. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: iya melibatkan komunitas pemerintah seperti lurah dan kelompok masyarakat yang ada di sekitar area perusahaan dalam perencanaan program Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: sudah ada terutama pembuatan parit atau drainase dan kolam untuk budidaya ternak lele. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membahas sarana dan prasarana yang dimiliki dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksana dengan Efektif. Hal ini tuntutananya terkait stakeholder bersama pemangku kepentingan. Namun sejak tahun lalu juga perusahaan merangkul pemerintah setempat minimal lurah kemudian kecamatan dan balik lagi terkait penerimaan manfaat langsung program CSR ini yaitu masyarakat. Jadi secara tidak langsung juga pelaksanaan kegiatan CSR ini dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat mengajukan proposal terus kemudian dana CSR itu cair, mereka yang berhak secara SOP memiliki tanggung jawab penuh atas bantuan CSR tersebut. Salah satu contoh kegiatan CSR yaitu tentang pertanian pihak perusahaan juga merangkul Dinas Pertanian, kalau kegiatan pemadam kebakaran pihak perusahaan menggandeng BPBD, jadi tergantung dari kegiatan program CSR itu sendiri. Kemudian perusahaan juga melibatkan kelurahan beserta kelompok masyarakat terkait pembangunan drainase di jalan lintas desa tanjung jaya dan juga jalan

siliwangi bersama LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yg jadi pelaksananya. Dan pada tahun 2021 ini juga diajukan lagi untuk penyambungan drainase karna program ini bertahap. Dari forum CSR nya sendiri juga melibatkan komunitas pemerintah seperti lurah dan kelompok masyarakat yang ada di sekitar area perusahaan dalam perencanaan program Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun dalam pelibatan perusahaan, forum CSR tidak ada koordinasi terkait sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai dalam menyampaikan sumber daya anggaran terlaksana dengan efektif. Program CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero), kemudian untuk keberlanjutan program itu pasti ada, sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan social mapping (pemetaan sosial). Jadi dari hasil pemetaan sosial yang dilakukan itu nanti dapat rekomendasi dari program dan kegiatannya, dimana hasil dari rekomendasi ini dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi). Kemudian inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan selama 5 tahun. Kemudian dari sarana dan prasarana yang dimiliki sudah bisa dikatakan efektif, karna PT Pertamina RU II Kota Dumai ini telah berkoordinasi kepada stakeholder bersama pemangku kepentingan terkait program CSR yang akan disalurkan. Namun sejak tahun lalu juga perusahaan merangkul pemerintah setempat minimal lurah, kemudian kecamatan dan balik lagi terkait penerimaan

manfaat langsung program CSR ini yaitu masyarakat. Jadi secara tidak langsung juga pelaksanaan kegiatan CSR ini dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Karna masyarakat lah yang berhak secara SOP memiliki tanggung jawab penuh atas bantuan CSR tersebut. Salah satu contoh kegiatan CSR yaitu tentang pertanian pihak perusahaan juga merangkul Dinas Pertanian, kalau kegiatan pemadam kebakaran pihak perusahaan menggandeng BPBD, jadi tergantung dari kegiatan program CSR itu sendiri. Kemudian perusahaan juga melibatkan kelurahan beserta kelompok masyarakat terkait pembangunan drainase di jalan lintas desa tanjung jaya dan juga jalan siliwangi bersama LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yg jadi pelaksananya. Dan pada tahun 2021 ini juga diajukan lagi untuk penyambungan drainase karna program ini bertahap. Kemudian dari forum CSR nya sendiri juga melibatkan komunitas pemerintah seperti lurah dan kelompok masyarakat yang ada di sekitar area perusahaan dalam perencanaan program Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun dalam pelibatan perusahaan, forum CSR tidak ada koordinasi terkait sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh perusahaan.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah wajak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab

secara lisan antara peneliti dan beberapa narasumber yakni Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada 1 Maret 2021. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan topik Disposisi, adapun peneliti beberapa pertanyaan pada sub-sub indikator sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai melaksanakan menyesuaikan dengan besar serapan dalam operasi perusahaan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: kalau untuk sekarang ini perusahaan sudah lama tidak ada masalah kilang, jadi sebelum nya perusahaan itu di tuntutan untuk melaksanakan CSR ketika emang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Cuma ketika sebelum melakukan tanggung jawab sosial itu terdapat dokumen-dokumen yang harus di selesaikan. Jadi ketika dokumen itu telah diselesaikan, otomatis untuk dampak yang diberikan itu sudah tidak ada lagi. Lalu beralih ke dokumen yang lainnya, jadi dokumen yang dimaksud ini yaitu aturan tersendiri tentang TJSL ini yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang berisi tentang 2% dari keuntungan. Justru perusahaan telah melampaui peraturan yang telah ditetapkan tersebut, jadi untuk tahun kemaren perusahaan itu bisa dikatakan merugi. Bahkan disaat rugi sekali pun pihak perusahaan tetap memberikan CSR, jadi bisa dibilang statusnya itu pihak perusahaan sudah melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai berapa persen yang harus dikeluarkan terhadap keuntungan perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan ini. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,  
& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: hal yang sama yang telah disampaikan oleh bapak bambang imawan mengenai masalah yang dihadapi dengan besar serapan terkait dalam operasi perusahaan ini yaitu sebelum nya perusahaan di tuntutan melaksanakan CSR ketika memang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar. Jadi sebelum melakukan tanggung jawab sosial ini terdapat dokumen-dokumen yang harus di selesaikan terlebih dahulu. Jadi ketika dokumen itu telah diselesaikan, maka dari dampak yang diberikan itu sudah tidak ada lagi. Terus dari situ perusahaan beralih ke dokumen yang lainnya, jadi dokumen yang dimaksud ini yaitu aturan tersendiri tentang TJSL ini yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang berisi tentang 2% dari keuntungan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Justru dari aturan tersebut, perusahaan telah melampaui peraturan yang telah ditetapkan itu, jadi untuk tahun kemaren perusahaan itu bisa dikatakan merugi. Bahkan disaat rugi sekali pun pihak perusahaan tetap memberikan CSR, jadi bisa dikatakan pihak perusahaan sudah melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai berapa persen yang harus dikeluarkan terhadap keuntungan perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan ini. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: program-program ini memang tetap mereka koordinasi karna ada pendampingnya dari setiap program-program CSR yang mereka berikan lalu dikoordinasikan kepada kelompok masyarakat. Jadi melalui pendamping atau penyuluh dari mereka yg tetap koordinasi apa apa saja yg perlu dibantu melalui program CSR mengenai kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: untuk ini tergantung dari PT. Pertamina RU II Dumai, apakah sudah menyesuaikan hasil dengan besar serapan dalam operasi perusahaan yang telah dilaksanakan. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: ada tapi terbatas. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membahas masalah yang dihadapi dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksa dengan Efektif. Untuk saat ini PT Pertamina RU II Kota Dumai sudah lama tidak ada masalah terhadap kilang, jadi sebelum nya perusahaan di tuntutan untuk melaksanakan CSR ketika memang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Namun ketika sebelum melakukan tanggung jawab sosial itu terdapat dokumen-dokumen yang harus di selesaikan oleh perusahaan terkait permasalahan yang terjadi. Jadi ketika dokumen itu telah diselesaikan oleh perusahaan, otomatis untuk dampak yang diberikan itu sudah tidak ada lagi. Lalu beralih ke dokumen yang lainnya yaitu aturan tersendiri tentang TJSL ini yang tercantum dalam peraturan menteri Negara BUMN nomor 5 tahun 2007 BAB III Pada Pasal 9 disebutkan bahwa yakni 2% dari laba perusahaan yang diperuntukan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah menjadi tatanan umum praktis perusahaan pelaksanaan TJSP. Justru saat ini perusahaan bisa dikatakan telah melampaui batas peraturan yang telah ditetapkan tersebut, jadi untuk tahun sebelumnya perusahaan itu bisa dikatakan merugi. Bahkan disaat rugi sekali pun pihak perusahaan tetap memberikan CSR, jadi bisa dikatakan perusahaan PT Pertamina RU II Kota Dumai ini sudah melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai berapa persen yang

harus dikeluarkan terhadap keuntungan perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Dan dari forum CSR nya sendiri, melimpahkan kepada perusahaan terkait besar serapan dalam operasi yang telah dilaksanakan. Kemudian dari hasil laporan tersebut baru disampaikan kepada forum tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Perubahan yang dihadapi

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai adanya pertanggung jawaban atas berkelanjutan dan keberlangsungan program dan dampak atas operasi nya?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: kalau untuk ini balik lagi ke Renstra (Rencana Strategi) yang dibuat oleh Perusahaan selama 5 tahun, Cuma kembali lagi ke masyarakatnya. Ketika masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program tersebut pihak perusahaan langsung mengganti kelompok masyarakat itu ke kelompok masyarakat yang lainnya, perusahaan berharap dari bantuan program CSR yang diberikan masyarakat itu harus mandiri dan berkelanjutan. Jadi kembali lagi ke masyarakat tersebut ketika mereka mampu memberikan apa yang perusahaan ekspektasi kan maka kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, buat apa perusahaan berinvestasi pada sesuatu yang memang tidak menguntungkan. Kalo untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program CSR ini perusahaan bertanggung jawab tapi balik lagi ke kinerja masyarakatnya dari bantuan program CSR yang diberikan oleh perusahaan, karna perusahaan juga harus melaporkan hasil dari program ini ke pusat PT. Pertamina (Persero) bagaimana keberlangsungan program. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm,

Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: untuk perubahan ini kembali lagi ke masyarakatnya. Ketika*

*masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program yang diberikan oleh perusahaan maka langsung di ganti kelompok masyarakat yang diberi program tadi ke kelompok masyarakat yang lainnya, perusahaan berharap dari bantuan program CSR yang diberikan tersebut, masyarakat itu bisa mandiri dan berkelanjutan. Jadi buat apa perusahaan berinvestasi pada sesuatu yang memang tidak menguntungkan. Kalo untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program CSR ini perusahaan sangat bertanggung jawab tapi balik lagi ke kinerja masyarakatnya dari bantuan program CSR yang diberikan oleh perusahaan ini, karna perusahaan juga harus melaporkan hasil dari program ini ke pusat PT. Pertamina (Persero) bagaimana keberlangsungan program yang telah dilaksanakan. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: Alhamdulillah sudah ada dampaknya dari program yang diberikan oleh perusahaan, seperti pembuatan drainase ataupun program-program bantuan kepada kelompok nelayan, kelompok tani, dan kelompok tenun. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: sudah ada pertanggung jawaban atas keberlangsungan program dan dampak atas operasi dari perusahaan, namun untuk keberlanjutan program tidak ada karena perusahaan hanya melaksanakan program CSR sekali dalam setahun dan akan diganti untuk tahun berikutnya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: perubahan ini tergantung ke pada masyarakat nya, jadi ketika masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan khususnya di bidang perikanan seperti budaya ternak lele, maka sulit untuk mendapatkan perubahan dari hasil yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membahas perubahan

yang dihadapi dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksa dengan Efektif. Untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program CSR ini perusahaan telah bertanggung jawab sepenuhnya akan tetapi balik lagi ke kinerja masyarakatnya. Dari program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan ini ketika masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program yang diberikan maka pihak perusahaan langsung mengganti kelompok masyarakat itu ke kelompok masyarakat yang lainnya, perusahaan berharap dari bantuan program CSR yang diberikan masyarakat itu harus mandiri dan berkelanjutan. Jadi kembali lagi ke masyarakat tersebut ketika mereka mampu memberikan apa yang perusahaan ekspetasi kan maka kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, buat apa perusahaan berinvestasi pada sesuatu yang memang tidak menguntungkan. Jadi balik lagi ke Renstra (Rencana Strategi) yang dibuat oleh Perusahaan selama 5 tahun yang telah disepakati terkait program-program CSR yang akan diberikan ke masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai dalam membahas Disposisi (Sikap) dalam masalah yang dihadapi dan perubahan yang dihadapi bisa dikatakan terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan saat ini PT Pertamina RU II Kota Dumai sudah lama tidak memiliki masalah terhadap kilang minyak, jadi sebelum

nya perusahaan diuntut untuk melaksanakan CSR ketika memang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Namun untuk masalah yang dihadapi sudah diatasi oleh perusahaan. Jadi ketika sebelum melakukan tanggung jawab sosial tersebut yang memberikan dampak ke masyarakat terdapat dokumen-dokumen yang harus di selesaikan oleh perusahaan terkait permasalahan yang terjadi. Jadi ketika dokumen itu telah diselesaikan oleh perusahaan, otomatis untuk dampak yang diberikan itu sudah tidak ada dan dianggap sudah selesai. Lalu ketika sudah selesai masalah yang dihadapi, pihak perusahaan beralih ke dokumen yang lainnya yaitu aturan tersendiri tentang TJSL yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang berisi tentang 2% dari keuntungan sebagai pedoman untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Justru pada saat ini perusahaan bisa dikatakan telah melampaui batas peraturan yang telah ditetapkan tersebut, jadi untuk tahun sebelumnya perusahaan itu bisa dikatakan merugi. Bahkan disaat rugi sekali pun pihak perusahaan tetap memberikan program CSR, jadi bisa dikatakan perusahaan PT Pertamina RU II Kota Dumai ini sudah melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai berapa persen yang harus dikeluarkan terhadap keuntungan perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Namun dari forum CSR nya sendiri, sudah melimpahkan kepada perusahaan terkait besar serapan dalam operasi yang telah dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai.

Kemudian dampak perubahan yang dihadapi untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program CSR ini perusahaan telah bertanggung jawab sepenuhnya dan bisa dikatakan telaksana dengan efektif. Akan tetapi semua itu

balik lagi ke kinerja masyarakatnya. Dari program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan ini ketika masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program yang diberikan maka pihak perusahaan langsung mengganti kelompok masyarakat itu ke kelompok masyarakat yang lainnya, perusahaan berharap dari bantuan program CSR yang diberikan masyarakat itu harus mandiri dan berkelanjutan. Jadi kembali lagi ke masyarakat tersebut ketika mereka mampu memberikan apa yang perusahaan ekspektasi kan maka kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, buat apa perusahaan berinvestasi pada sesuatu yang memang tidak menguntungkan. Jadi balik lagi ke Renstra (Rencana Strategi) yang dibuat oleh Perusahaan selama 5 tahun yang telah disepakati terkait program-program CSR yang akan diberikan ke masyarakat. Untuk program CSR yang diberikan sudah ada dampaknya dari program seperti pembuatan drainase ataupun program-program bantuan kepada kelompok nelayan, kelompok tani, dan kelompok tenun. Namun dari dampak perubahan ini tergantung dari masyarakatnya lagi dalam mengembangkan program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi apabila adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa narasumber yakni Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada 1 Maret 2021. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan topik Struktur Birokrasi, adapun peneliti beberapa pertanyaan pada sub-sub indikator sebagai berikut:

a. Adanya pengawasan

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai dalam pelaksanaannya adanya upaya mengawasi keberlanjutan program?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: iya pasti ada, jadi setiap refinery unit yang ada di PT. Pertamina (Persero) ini pasti ada pendamping untuk masyarakatnya seperti komunitas development officer, jadi tugas dari komunitas ini untuk memonitoring program, keberlanjutan program, dan evaluasi program CSR yang diberikan kepada masyarakat. (Kamis, 8 Juli 2021, 11:04:40 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: iya pasti ada, jadi di perusahaan itu ada namanya pendamping atau penyuluh untuk kelompok masyarakatnya yang disebut komunitas*

*development officer, jadi tugas dari komunitas ini untuk memonitoring program, keberlanjutan program, dan evaluasi program CSR yang diberikan kepada masyarakat. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: iya turun kelapangan, yang pasti pendamping atau penyuluh dari perusahaan selalu survei lalu mengkoordinasi kepada kelurahan bersama LPMK sebelum diberikan program CSR ini mereka berkomunikasi terlebih dahulu kepada kelompok masyarakat, kemudian survei ke lapangan apa kira-kira yang dibutuhkan. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: untuk bidang pengawasan di forum CSR ini tidak ada yang mengawasi keberlanjutan program. Jadi program CSR ini langsung dari perusahaan yang mengawasi lalu hasil dari produk nya itu baru diserahkan atau disampaikan kepada forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Akan tetapi sejauh ini pihak perusahaan belum ada menyampaikan hasil program CSR yang telah dilaksanakan kepada forum CSR ini. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: alhamdulillah untuk pengawasan ini pihak perusahaan sudah turun ke lapangan untuk mensurvei selama tiga bulan sekali terkait berjalannya program-program CSR yang perusahaan berikan. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan pengawasan dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksa dengan Efektif. Dari adanya pengawasan ini PT.

Pertamina (Persero) ini sudah ada pendamping untuk masyarakatnya seperti komunitas development officer, jadi tugas dari komunitas ini untuk memonitoring program, keberlanjutan program, dan evaluasi program CSR yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan ini dilakukan selama tiga bulan sekali mengenai berjalannya program-program CSR yang disalurkan oleh perusahaan untuk masyarakat.

Kemudian dari forum CSR untuk bidang pengawasan ini tidak ada yang mengawasi keberlanjutan program. Jadi program-program CSR yang diberikan ini langsung dari perusahaan yang mengawasi lalu hasil dari produk nya itu baru diserahkan atau disampaikan kepada forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Akan tetapi sejauh ini pihak perusahaan belum ada menyampaikan hasil program CSR yang telah dilaksanakan kepada forum CSR.

b. Adanya Evaluasi

Menurut Bapak/Ibu apakah Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai dalam pelaksanaannya melakukan evaluasi secara berkala akan berkelanjutan dan keberhasilan program?

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Unit Manager Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Bapak Bambang Imawan:

*Jawab: iya setiap tahun pasti ada dilakukan, dari monitoring, evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Juga melibatkan lembaga pendidikan berdasarkan peraturan menteri (permen), cuma untuk tahun 2021 ini tidak perlu melibatkan pihak dari lembaga pendidikan untuk pelaksanaan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), cukup pendamping seperti Komunitas Development Officer tadi yang turun ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan. (Kamis, 8 Juli*

2021, 11:04:40 WIB)

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Staff Koordinator Comm, Rell,  
& CSR RU II Kota Dumai, Ibu Iwed Mulyani:

*Jawab: iya ada, jadi setiap tahun pasti ada dilakukan dari monitoring, evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Juga melibatkan lembaga pendidikan, cuma untuk tahun 2021 ini tidak perlu melibatkan pihak dari lembaga pendidikan untuk pelaksanaan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), cukup pendamping seperti Komunitas Development Officer yang turun ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan. (Kamis, 8 Juli 2021, 13:36:28 WIB)*

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Lurah Tanjung Palas,

Bapak Aga Muhaimin, A.md:

*Jawab: iya ada, perusahaan tetap selalu mersurvei ke lapangan dan mengevaluasi sudah sampai tahap mana bantuan program CSR ini berjalan. (Senin, 5 Juli 2021, 11:53:28 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Forum Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan, Bapak Indra Gunawan S. Sos M.IP:

*Jawab: tidak ada evaluasi dari forum tanggung jawab sosial perusahaan mengenai berkelanjutan dan keberhasilan terhadap program CSR, karna ketika udah diserahkan oleh perusahaan dokumen hasil laporan dari program CSR ini, forum TJSP sudah menganggap hasil laporan itu selesai. Tetapi selama forum CSR ini dibentuk belum ada pihak perusahaan menyampaikan hasil laporan tentang program-program CSR yang dilaksanakan kepada forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (Senin, 12 Juli 2021, 09:44:32 WIB)*

Wawancara yang diperoleh langsung dengan Ketua RT 02 Kelurahan

Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Bapak Ramli:

*Jawab: program CSR ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap tahunnya, akan tetapi tergantung dari masyarakatnya apakah serius dalam mengembangkan program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan. (Selasa, 6 Juli 2021, 12:06:36 WIB)*

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan evaluasi dari hasil penyampaian oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terlaksa dengan Efektif. PT Pertamina RU II Kota Dumai ini setiap tahun melakukan monitoring, evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Juga melibatkan lembaga pendidikan berdasarkan peraturan menteri (permen). Akan tetapi untuk tahun 2021 ini tidak perlu melibatkan pihak dari lembaga pendidikan untuk pelaksanaan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), cukup pendamping seperti Komunitas Development Officer tadi yang turun ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan.

Kemudian dari forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) nya sendiri tidak ada melakukan evaluasi mengenai berkelanjutan dan keberhasilan terhadap program CSR. Karna ketika sudah diserahkan oleh perusahaan dokumen hasil laporan dari program CSR ini, forum TJSP sudah menganggap hasil laporan itu selesai. Namun selama forum CSR ini dibentuk belum ada pihak perusahaan menyampaikan hasil laporan tentang program-program CSR yang dilaksanakan kepada forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai dalam membahas Struktur Birokrasi dalam membahas pengawasan dan evaluasi bisa dikatakan terlaksana

dengan efektif. Dalam hal pengawasan PT Pertamina (Persero) ini sudah ada pendamping untuk masyarakatnya seperti komunitas development officer yang tugasnya untuk memonitoring program, keberlanjutan program, dan evaluasi program CSR yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai ini dilakukan selama tiga bulan sekali terkait berjalannya program-program CSR yang disalurkan oleh perusahaan untuk masyarakat. Kemudian dari forum CSR untuk bidang pengawasan ini tidak ada yang mengawasi keberlanjutan program. Jadi program-program CSR yang diberikan ini langsung dari perusahaan yang mengawasi lalu hasil dari produknya itu baru diserahkan atau disampaikan kepada forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Akan tetapi sejauh ini pihak perusahaan belum ada menyampaikan hasil program CSR yang telah dilaksanakan kepada forum CSR.

Dari evaluasi juga PT Pertamina RU II Kota Dumai setiap tahunnya melakukan monitoring, evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh komunitas Development Officer yang turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi sejauh ini dari forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) nya sendiri belum mendapatkan hasil laporan tentang program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**C. Matriks Telly Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

Berdasarkan Matriks kesimpulan penelitian pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina Refinery Unit II Kota Dumai adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 2 Matriks Telly Kesimpulan Penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

No	Sub Indikator	Jawaban Informan/Narasumber					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	<b>Komunikasi:</b> Kejelasan Komunikasi	√	√	√	X	√	Cukup Efektif
2	Kesulitan Komunikasi	√	√	√	X	√	Cukup Efektif
3	<b>Sumber Daya:</b> Adanya Sumber Daya Anggaran	√	√	√	√	√	Efektif
4	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	√	√	√	√	√	Efektif
5	<b>Disposisi:</b> Masalah Yang Dihadapi	√	√	√	√	√	Efektif
6	Perubahan Yang Dihadapi	√	√	√	√	√	Efektif
7	<b>Struktur Birokrasi:</b> Adanya Pengawasan	<b>1</b>			<b>2</b>		Efektif
		√			√		
8	Adanya Evaluasi		√			√	Efektif

Sumber : *Modifikasi Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari berbagai sub Indikator yang peneliti gunakan sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari indikator Komunikasi pada point nomor 1 – 2 pada tabel diatas, dinilai masih cukup efektif. Hal ini dikarenakan PT Pertamina RU II Kota Dumai kurang dalam berkomunikasi kepada instansi pemerintahan, PT Pertamina RU II Kota Dumai

hanya menerima laporan apa – apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat hanya melalui kelurahan yang merupakan gerbang informasi pertama dari masyarakat, selanjutnya di Musrenbang akan diusulkan dan ditinjau yang mana nantinya program-program CSR yang akan diprioritaskan.

Sedangkan dari Indikator Sumber Daya, peneliti gunakan Sub Indikator sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang pada point nomor 3 – 4 pada tabel diatas, dikatakan terlaksana dengan efektif. Program CSR dari PT. Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero) nya sendiri, kemudian untuk keberlanjutan program sudah ada sebelum melaksanakan program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan social maping (pemetaan sosial). Jadi dari hasil pemetaan sosial yang dilakukan itu nanti dapat rekomendasi dari program dan kegiatan nya, dimana hasil dari rekomendasi ini dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi) yang menjadi pedoman untuk 5 tahun kedepannya. Kemudian dari sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan juga melibatkan kelurahan beserta kelompok masyarakat terkait pembangunan drainase di jalan lintas desa tanjung jaya dan juga jalan siliwangi bersama LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yg jadi pelaksananya. Dan pada tahun 2021 ini juga diajukan lagi untuk penyambungan drainase karna program ini bertahap.

Dalam Indikator Disposisi, peneliti gunakan Sub Indikator sebagai

pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang pada point nomor 5 – 6 pada tabel diatas, dikatakan terlaksana dengan efektif. Perusahaan di tuntut untuk melaksanakan CSR ketika memang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Namun untuk masalah yang dihadapi sudah diatasi oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai. Jadi ketika sebelum melakukan tanggung jawab sosial tersebut yang memberikan dampak ke masyarakat terdapat dokumen-dokumen yang harus di selesaikan oleh perusahaan terkait permasalahan yang terjadi. Jadi ketika dokumen itu telah diselesaikan oleh perusahaan, otomatis untuk dampak yang diberikan itu sudah tidak ada dan dianggap sudah selesai. Lalu ketika sudah selesai masalah yang dihadapi, pihak perusahaan beralih ke dokumen yang lainnya yaitu aturan tersendiri tentang TJSL yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang berisi tentang 2% dari keuntungan sebagai pedoman untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Justru pada saat ini perusahaan bisa dikatakan telah melampaui batas peraturan yang telah ditetapkan tersebut, jadi untuk tahun sebelumnya perusahaan itu bisa dikatakan merugi. Bahkan disaat rugi sekali pun pihak perusahaan tetap memberikan program CSR. Namun dari untuk forum CSR nya sendiri, sudah melimpahkan kepada perusahaan terkait besar serapan dalam operasi yang telah dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai.

Kemudian dampak perubahan yang dihadapi untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program CSR ini perusahaan telah bertanggung jawab sepenuhnya dan bisa dikatakan telaksana dengan efektif. Akan tetapi semua itu balik lagi ke kinerja masyarakatnya. Dari program-program CSR yang telah diberikan oleh perusahaan ini ketika masyarakat itu tidak serius untuk mengembangkan program yang diberikan maka pihak perusahaan langsung mengganti kelompok masyarakat itu ke kelompok masyarakat yang lainnya, perusahaan berharap dari bantuan program CSR yang diberikan masyarakat itu harus mandiri dan berkelanjutan.

Dalam Indikator Struktur Birokrasi, peneliti gunakan Sub Indikator sebagai pertanyaan untuk memperoleh informasi dari Unit Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit II Kota Dumai, Staff Koordinator Comm, Rell, & CSR RU II Kota Dumai, Lurah Tanjung Palas dan RT, serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang pada point nomor 7 – 8 pada tabel diatas, dikatakan terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sedang dilaksanakan, PT Pertamina RU II Kota Dumai sudah ada pendamping untuk masyarakatnya seperti komunitas development officer yang tugasnya untuk memonitoring program, keberlanjutan program yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian setiap tahunnya melakukan evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh komunitas Development Officer yang turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat.

**D. Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai**

Berdasarkan tanggapan wawancara dan informan yang dilakukan oleh peneliti adanya beberapa faktor terhambatnya Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina RU II Kota Dumai yakni sebagai berikut:

1. Kendala yang sering terjadi yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi pemerintah terutama forum TJSP dengan perusahaan dalam hal mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses kelancaran program-program yang direncanakan oleh perusahaan.
2. Kurangnya respon dari masyarakat terhadap program CSR yang diberikan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan program yang dibuat oleh perusahaan menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan efektif.
3. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) tidak mengawasi keberlangsungan program yang dilaksanakan oleh perusahaan.
4. Perusahaan belum mengetahui bahwasannya forum TJSP sudah ada di kota Dumai, begitu juga dengan forum TJSP yang tidak menunjukkan diri kepada PT Pertamina RU II Kota Dumai bahwasannya forum TJSP ini telah terbentuk.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis, maka pada Bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina RU II Kota Dumai. Dan penulis juga memberikan saran sebagai acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat dan berguna yang memberikan fungsi akademis dan fungsi praktis bagi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina RU II Kota Dumai, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), kelurahan, serta masyarakat dan semoga juga pada karya yang penulis buat ini menjadi bahan perubahan untuk keadaan yang lebih baik bagi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina RU II Kota Dumai.

#### A. Kesimpulan

Indikator Komunikasi dalam penelitian Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai terlaksana cukup efektif sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Kota Dumai sebelum memberikan program CSR, perusahaan membahas terlebih dahulu gambaran mengenai program-program CSR yang sifatnya lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat.

PT Pertamina RU II Kota Dumai juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan kelompok masyarakat dalam merumuskan rencana kerja tahunan bersama

komunitas, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaatnya sesuai dengan aspirasi dan usulan-usulan dari masyarakat terhadap program-program apa saja yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan juga menggandeng LPMK yang tugasnya memberikan edukasi dan bimbingan kepada kelompok masyarakat binaan selama pelaksanaan program CSR.

Namun yang menjadi kesulitan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT Pertamina RU II Kota Dumai ini belum adanya koordinasi antara perusahaan dan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kota Dumai terkait program-program apa saja yang akan disalurkan kepada masyarakat. sejauh ini perusahaan belum mengetahui bahwasannya forum TJSP itu sudah ada di kota dumai, begitu juga dengan forum TJSP yang tidak menunjukkan diri kepada PT Pertamina RU II Kota Dumai bahwasannya forum TJSP ini telah terbentuk.

Indikator Sumber Daya dalam penelitian Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai terlaksana dengan efektif. Program CSR dari PT Pertamina RU II Dumai ini sumber daya anggarannya dari PT. Pertamina (Persero), kemudian untuk keberlanjutan program sebelum melaksanakan sebuah program CSR, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan social mapping (pemetaan sosial). Kemudian dikembangkan menjadi Renstra (Rencana Strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan.

Begitu pun dengan indikator Disposisi dalam penelitian Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai bisa dikatakan terlaksana dengan efektif. Hal ini dikarenakan PT Pertamina RU II Kota Dumai sudah lama tidak memiliki masalah terhadap kilang minyak, jadi sebelumnya perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR ketika memang memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Namun untuk masalah yang dihadapi sudah diatasi oleh perusahaan.

Indikator Struktur Birokrasi dalam penelitian Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai terlaksana dengan efektif. Dalam hal pengawasan PT Pertamina (Persero) ini sudah ada pendamping untuk masyarakatnya seperti komunitas development officer yang tugasnya untuk memonitoring program, keberlanjutan program, dan evaluasi program CSR yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai ini dilakukan selama tiga bulan sekali terkait berjalannya program-program CSR yang disalurkan oleh perusahaan untuk masyarakat.

Dari evaluasi juga PT Pertamina RU II Kota Dumai setiap tahunnya melakukan monitoring, evaluasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh komunitas Development Officer yang turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan.

Namun yang menjadi kendala sejauh ini yakni perusahaan belum ada menyampaikan hasil dari monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan kepada forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) karena

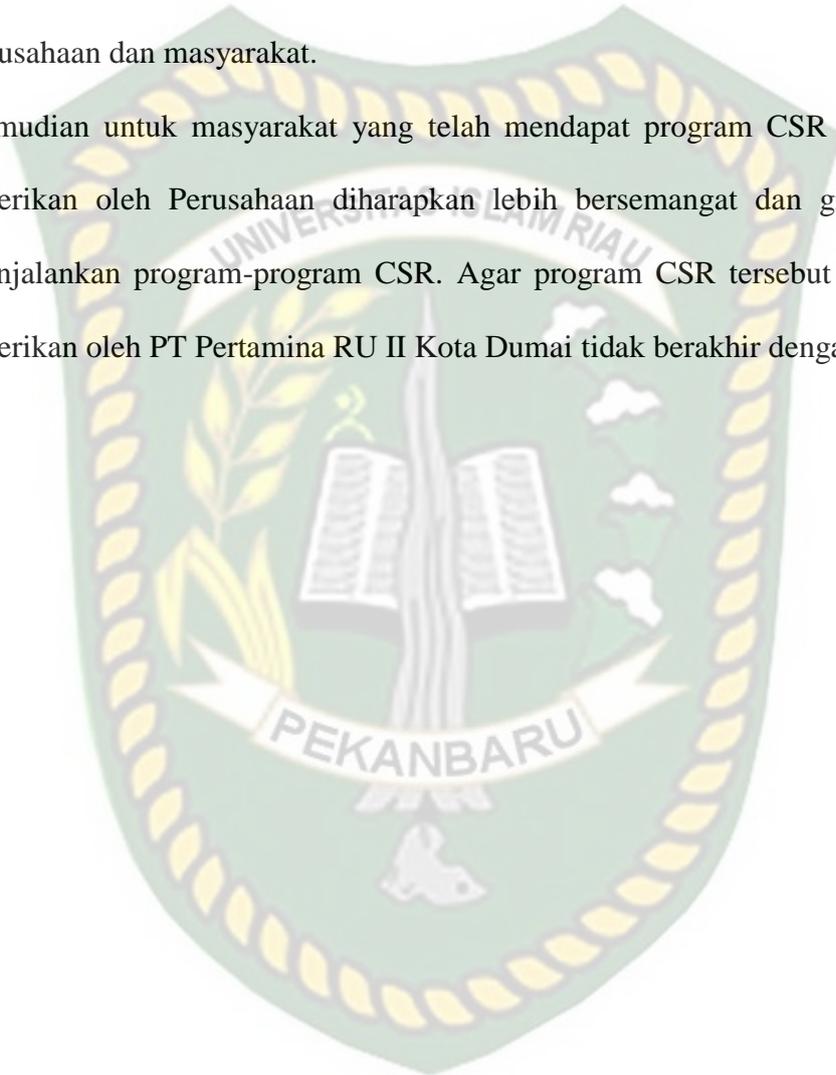
tidak tahu sama sekali bahwasannya forum CSR ini sudah ada dan terbentuk di kota Dumai.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai dalam upaya Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai.

1. Diharapkan kepada PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai lebih transparan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi kepada pemerintah dalam hal mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Diharapkan kepada PT Pertamina RU II Kota Dumai ini melaksanakan program tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dapat dirasakan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
3. PT Pertamina (Persero) RU II Kota Dumai diharapkan dapat meningkatkan implementasi yang telah dilaksanakan, karena program CSR tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi dan membantu masyarakat sehingga dapat membuat citra perusahaan semakin baik dikalangan masyarakat.
4. Diharapkan harus adanya perbaikan komunikasi antara pemerintah kabupaten kota, forum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) , perusahaan, dan masyarakat agar program-program yang ingin dilaksanakan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

5. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten kota dan khususnya forum tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) agar meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah no 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada perusahaan dan masyarakat.
6. Kemudian untuk masyarakat yang telah mendapat program CSR yang telah diberikan oleh Perusahaan diharapkan lebih bersemangat dan gigih dalam menjalankan program-program CSR. Agar program CSR tersebut yang telah diberikan oleh PT Pertamina RU II Kota Dumai tidak berakhir dengan sia sia.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Agustino, Leo.2006 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:CV.Alfabeta Bandung.
- Arikunto,Suharsimi.2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Edisi Revisi VI).Jakarta:Rineka Cipta.
- Budi Hendrik Untung. 2008.*Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edward III, George C.1980.*Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- George.R Terry 2006.*Prinsip-prinsip Manajemen* .Jakarta Bumi Aksara
- Hamim ,Sufian .2005.*Administrasi,Organisasi,dan Manajemen* .Pekanbaru :UIR Press
- Iskandar .2008.*Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta:Guang Persada Press
- Kartini,Dwi.2009. *Corporate Social Responsibilty*.Bandung: Refika Aditama
- Karyanto.2006.*Dasar-Dasar Teori dan Konsep*.Yogyakarta:Andi offset
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate social responsibility (tanggung jawab sosial korporasi)*.Bandung:Alfabeta.
- Martoyo,Susilo.2000.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta.Bppe
- Mulyadi, Deddy.2012.*Bahan Ajar Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN Press.
- Mulyono.2016.*Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*.Jogjakarta:

AR-Ruzz Media

N. Duun, William. 2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.

Narbuko Cholid & Abu Achmadi.2008.*Metodologi Penelitian*.Jakarta:Bumi Aksara

Nawawi,Hadari.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Pasolong,Harbani,2013.*Teori Administrasi Publik*.Bandung:Alfabeta

Ratminto dan Septi Atik. 2005 .*Manajemen Pelayanan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian P.Sondang.2003.*Filsafat Administrasi Edisi revisi*.Jakarta :Bumi Aksara

Siagian,P.Sondang.2007.*Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung

Siswanto,HB.2005.*Pengantar Manajemen*.Jakarta :Bumi Aksara

Soekanto,Sorjono.2014.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Perss

Sugiono,2009.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabet

Syafiie,Inu Kencana,2003.*Administrasi Negara Indonesia*.Jakarta:Bumi Aksara

Syafri Wirman,2012.*Studi Administrasi Publik*.Jatinegoro:Erlangga

Usman,usaini.2009.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta:Bumi Aksara

Wedayanti, Made Devi.2019.*Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Yussa H.A Tarmizi & Hendry Andry.2015.*Perilaku Etika Administrasi Publik*.

Pekanbaru:Marpoyan Tujuh Publihing

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. FISIPOL UIR Pekanbaru

Zulkifli & Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2015. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/1789>

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/23675/22927>

<http://wikipedia.com/> (diakses 28 januari 2019)

#### Dokumentasi:

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa, 2013 Pekanbaru Fisipol UIR.

Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial Perusahaan

Peraturan Daerah kota Dumai nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

UU No. 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Jurnal:

Dedi Risaldi, A. M. (2016). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016, Volume 2 Nomor 1*, 20-29.

M. Dedy Arianto, D. D. (2013). Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibilities (CSR) PT. Indo Tambangraya Megah Tbk Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Bontang Lestari. *Jurnal Administrasi Reform, Vol.1 No.2, Tahun 2013, Vol.1*, 380-384.

Novriza, W. (2017). Pelaksanaan Csr(Corporate Social Responsibility) Pada Pt. Riau Andalan Pulp And Paper Dalam Penyuksesan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Kabupaten Kampar. *Jom Fisip Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, Vol. 4*, 5-7.

Firmando, H. (2015). Pelaksanaan Program CSR (Coporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina (Persero) Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fisip Vo. 2 No. 1 Februari 2015, Vo. 2*, 8-12.

Hidayat, N. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Lingkungan Perusahaan (Studi pada PT Budi Nabati Perkasa PKS7 Muara Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA), Vol. 3 No. 1 Desember 2018, hlm. 1-12, Vol. 3*, 1-12.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3825 /A\_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Angga Ardiansyah Putra  
Npm : 167110395  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II  
Kota Dumai.  
Persentase Plagiasi : 25 % ( 138 Halaman )  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230